

PERAN PUSAT DUKUNGAN ANAK DAN KELUARGA (PDAK)
DALAM MEMBANGUN MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL
DI PANTI ASUHAN YOGYAKARTA



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Oleh:

DWI PAPSA
NIM 12250040

Pembimbing:

Aryan Torrido, SE, M.Si.
NIP 19750510 200901 1 016

ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-01/Un.02/DD/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PUSAT DUKUNGAN ANAK DAN KELUARGA (PDAK) DALAM
MEMBANGUN MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL DI PANTI ASUHAN
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI PAPSA
Nomor Induk Mahasiswa : 12250040
Telah diujikan pada : Senin, 28 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

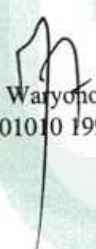
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Aryan Torrido, SE., M.Si
NIP. 19750510 200901 1 016

Penguji II


Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP. 19701010 199903 1 002

Penguji III


Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
NIP. 19830519 200912 2 002

Yogyakarta, 28 November 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN


Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca. Meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Dwi Papsa

NIM : 12250040

Judul Skripsi : Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) Dalam Membangun Manajemen Pelayanan Sosial di Panti Asuhan Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 21 November 2016

Mengetahui,
Ketua Prodi IKS



Andayani/S.IP, MSW
NIP 19721016 199903 2 008

Pembimbing



Aryan Torrido, S.E, M.Si
NIP 19750510 200901 1 016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Papsa
NIM : 12250040
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) Dalam Membangun Manajemen Pelayanan Sosial di Panti Asuhan Yogyakarta“ adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2016

Yang menyatakan



Dwi Papsa
NIM 12250040

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Papsa
Nim : 12250040
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkut pautkan pihak fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 November 2016

Yang menyatakan,



Dwi Papsa
NIM 12250040

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur
kupersembahkan karya kecilku ini
kepada:

Ayah dan Ibu tercinta

Atas segala kasih sayang, pengorbanan, dukungan, bimbingan yang tiada tara,
serta kesabaran dalam menemaniku sampai ke titik ini.

Keluarga besar dan orang yang kusayangi,

yang selalu menemani dan memberikan perhatian, kalian adalah tempatku
berkeluh kesah dan menjadi penyemangat dalam hidupku.

Dan sehabat-sehabatku dari masa sekolah dan kuliah yang hingga kini masih setia
dan seperjuangan.

MOTTO

Lima kunci kehidupan

“Pertama yang terberat itu pengorbanan, kedua yang terpanjang itu harapan, ketiga yang terpendek adalah putus asa, keempat yang terindah adalah kasih sayang, dan kelima yang terkuat adalah Iman.” (Rosalina musa).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan karunia dan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terkira kepada pihak-pihak yang telah menjadikan skripsi ini terwujud. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-NYA sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh pembelajaran dan kesabaran.
2. Bapak Prof. Drs KH Yudian Wahyudi PH. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga yang pastinya mendoakan para mahasiswa agar sukses selalu.
3. Ibu Dr. Nurjanah, M. Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran administrasi skripsi ini.
4. Andayani, SIP M.S.W, selaku ketua prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan kemudahan dalam pengurudan administrasi skripsi ini.
5. Asep Jahidin, M.Si selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis semasa awal studi sampai tugas akhir studi ini selesai.

6. Aryan Torrido, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen prodi IKS yang telah memberikan ilmu dan memperkaya khasanah bagi penulis dalam segala hal.
8. Segenap staff tata usaha prodi IKS dan staff tata usaha fakultas dakwah dan komunikasi yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi dari awal studi hingga akhir studi.
9. Witrijani, Rose Mery, Fajar Suryaman, pekerja sosial, dan segenap staf *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Nurul Hidayah selaku staf Panti Asuhan Yapitu Al-huda pucung dan Ibu Suprptini selaku Tim Monitoring PDAK yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak, ibu, mb nina, f”jri, kenzie, reza yang telah memberi motivasi dengan caranya masing-masing.
12. Sehabat- sehabat, orang terkasih, serta segenap pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti hanya mampu berdoa semoga amal baik Bapak/Ibu dan juga pembaca diberikan pahala oleh Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Hal itu diibaratkan “tak ada gading yang tak retak” tak

ada satu manusiapun yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menulis skripsi ini dan semoga berguna serta bermanfaat dalam bidang kesejahteraan sosial.

Yogyakarta, 21 November 2016

Penulis

Dwi Papsa
12250040

ABSTRAK

Dwi Papsa, Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam membangun Manajemen Pelayanan Sosial di Panti Asuhan Yogyakarta. Skripsi, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran-peran yang dilakukan oleh *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* dalam program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam membangun manajemen pelayanan sosial di panti asuhan Yogyakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya manajemen pelayanan sosial yang ada di Panti Asuhan masih bersifat konvensional seperti hanya untuk memenuhi kebutuhan anak seperti tempat tinggal, makan, dan mendapatkan pendidikan. Peran-peran untuk membangun manajemen pelayanan sosial yang mengutamakan pengasuhan berbasis keluarga merupakan upaya yang dilakukan PDAK agar anak dapat hidup dengan stabil dan layak bersama keluarga mereka. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam membangun manajemen pelayanan sosial di Panti Asuhan Yogyakarta?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peran PDAK dalam membangun manajemen pelayanan sosial, Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menentukan informan atau sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang merupakan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan informasi berkembang sesuai dengan kebutuhan.

Hasil penelitian terhadap peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam membangun manajemen pelayanan sosial adalah dengan beberapa peran, yaitu peran fasilitatif melalui sosialisasi penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), peran edukatif melalui pelatihan berupa *workshop* dan peningkatan kemampuan berupa konseling kasus, peran perwakilan melalui upaya PDAK dalam mendampingi kelengkapan administrasi akreditasi LKSA dan peran teknis melalui pelatihan pengolahan data dengan pendekatan manajemen kasus. Hasil peran membangun manajemen pelayanan tersebut diantaranya adalah pemahaman dan pengembangan kemampuan LKSA dalam pengasuhan berbasisi keluarga, penerapan manajemen kasus, dan pengakuan LKSA melalui akreditasi. Semua peran pendampingan yang dilakukan PDAK adalah untuk meningkatkan pengasuhan berbasis keluarga dan menanamkan budaya *good parenting*, serta guna mendukung pengakuan sistem pelayanan LKSA melalui akreditasi LKSA

Kata kunci: Peran PDAK, manajemen pelayanan sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMABAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	35
G. Sistematika Pembahasan	42
BAB II: GAMBARAN UMUM YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK	
<i>PARTNER OF SAVE THE CHILDREN (YSTC)</i>	
YOGYAKARTA	
A. Sejarah	44
B. Visi dan Misi	46
C. Lokasi	46
D. Struktur Organisasi	48
E. Sumber Daya Manusia	53
F. Program	55

G. Kemitraan	68
 BAB III: PERAN PUSAT DUKUNGAN ANAK DAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL DI PANTI ASUHAN	
A. Sejarah Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)	71
A.1. Ruang Lingkup Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)	79
B. Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA).....	83
C. Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)	
C.1. Pembentukan Tim Monitoring, Analisis Kebutuhan Panti Asuhan, Rencana Kegiatan	94
C.2. Peran Fasilitatif	99
C.3. Peran Edukatif	103
C.4. Peran Teknik	111
C.5. Peran Perwakilan (Representasional)	115
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran-Saran	121
C. Penutup	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data jumlah anak rawan di Indonesia pada 2014	3
Tabel 1.2. Data anak rawan di Provinsi Yogyakarta tahun 2014	4
Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia di Yayasan Sayangi Tunas Cilik <i>Partner of Save the Children</i> tahun 2016	54
Tabel 2.2. Kemitraan Yayasan Sayangi Tunas Cilik <i>Partner of Save the Children</i> Yogyakarta tahun 2016	68
Tabel 3.1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dampingan PDAK Per Juni 2016	78
Tabel 3.2. Indikator Standar Penentuan Respon Anak yang Tepat	85
Tabel.3.3. Indikator Standar Pelayanan Pengasuhan	86
Tabel 3.4. Indikator Standar Kelembagaan	88
Tabel 3.5. Tim Monitoring Tahun 2016	96
Tabel 3.6. Penilaian Tingkat Akreditasi	115
Tabel 3.7. LKSA Terakreditasi	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Konsep fungsi Manajemen	20
Gambar 1.2. Model tahapan organisasi.....	23
Gambar 1.3. Tingkatan manajemen	25
Gambar 1.4. Kerangka perencanaan pendampingan	27
Gambar 1.5. Analisis Data Kualitatif Miles Hurbeman	42
Gambar 2.1. Gambaran <i>Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children</i>	45
Gambar 2.2. Denah Lokasi Kantor YSTC	47
Gambar 2.3. Struktur Manajemen YTSC Yogyakarta tahun 2016-2017 ...	49
Gambar 3.1. Struktur Kerjasama PDAK, Tahun 2016	74
Gambar.3.2. Diagram Jumlah LKSA dampingan PDAK pada Tahun 2012-2016	76
Gambar 3.4. Pendekatan pengasuhan	81
Gambar 3.3. Alur Perlakuan Pendampingan PDAK	93
Gambar 3.5. Tim Monitoring melakukan pengawasan	95
Gambar 3.6. <i>Workshop</i> Terkait Penerapan <i>Good Parenting, Permanency Planning</i> , dan <i>attachment</i>	105
Gambar 3.7. Konseling kasus	109
Gambar 3.8. <i>Briefing</i> mahasiswa magang <i>Case Management</i>	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memiliki posisi dan proposi strategis dalam kehidupan skala mikro seperti keluarga dan skala makro seperti komunitas karena posisi dan potensinya itulah, maka anak harus diberi kesempatan dan jaminan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosialnya.¹ Faktanya tidak seperti yang diharapkan kondisi anak sendiri terancam. Banyak faktor yang menyebabkan anak terancam dalam tumbuh kembangnya, salah satu faktornya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global baik di negara maju atau negara berkembang. Anak-anak yang lahir di keluarga miskin, memiliki kesempatan kecil untuk memperoleh kehidupan yang layak, mereka tidak memiliki jaminan sosial, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sesuai.²

Indonesia sendiri juga terdapat masyarakat atau keluarga miskin, dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebanyak 27.727.780 juta dengan presentasi 11,25%.³ Meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak-anak rawan, tetapi dampak kemiskinan sangat terasa pada alokasi waktu dan pemberian akses keterpenuhan hak anak

¹ Ajat kurnia, “*Empowering dan Networking: Alternatif Penanggulangan Anak Jalanan*”, dalam Jurnal Ilmiah Peksos , Vol. 3: 2 (Desember: 2004), hlm. 489.

² Departemen sosial RI, *Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekat Multisystem*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, 2004), hlm. 239.

³ Badan Pusat Statistik, *Indonesia Dalam Angka 2015*.

semakin berkurang bahkan tidak ada sama sekali, kondisi inilah yang menciptakan anak rawan dari keluarga miskin tinggi.⁴

Adapula faktor lain yakni karena masalah struktural dan kultural (budaya), dimana masalah kultural tersebut dapat dilihat pada keempat hal yaitu:

“(1) karena masyarakat Indonesia sebagian memiliki persepsi dengan melihat anak adalah nilai ekonomi, bukan nilai sejarah atau nilai-nilai moral lainnya. (2) menyangkut pola asuh dimana utamanya pada masyarakat miskin tidak memiliki pola asuh yang memadai bagi anak-anaknya. (3) menyangkut tingkat pendidikan orang tua/ masyarakat kecenderungan yang ditemukan, semakin rendah tingkat pendidikan orang tua semakin tinggi tingkat perlakuan eksploitasi kepada anak. (4), menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, masyarakat pada umumnya menganggap bahwa kewajiban orang tua secara alamiah hanyalah memberi makan dan tempat tinggal, tetapi bukan memberikan menyiapkan kehidupan yang lebih baik dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.”⁵

Situasi anak di Indonesia memiliki realitas yang beragam seperti anak berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, anak balita terlantar, *childe Abuse*, pekerja anak, kekerasan seksual, anak jalanan, dan anak terlantar. Anak-anak ini biasa disebut dengan ‘anak rawan’. Penamaan anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-

⁴ Bagong suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 3.

⁵ Hadi Supeno, *Mewaspada Eksploitasi Anak* (Jakarta: KPAI CV Graha Putra, 2010), hlm.

haknya. *Inferior*, rentan dan marginal adalah beberapa ciri umum anak-anak rawan.⁶

Situasi tersebut layak untuk diperhatikan mengingat jumlah anak rawan di Indonesia tidak sedikit, (lihat tabel 1.1)

Tabel 1.1
Data jumlah anak rawan di Indonesia pada 2014

No	Kategori anak rawan	JUMLAH
1	Anak terlantar	3.115.177
2	Anak balita terlantar	1.224.168
3	Anak berhadapan dengan hokum	146.228
4	Anak Jalanan	134.903
5	Anak penyandang disabilitas	532.130
	JUMLAH	5.152.606 (6,76%)

Sumber : Kementrian Sosial RI

Kalau melihat jumlah anak Indonesia yang berumur 18 tahun kebawah sebanyak 79.898.000 juta, sedangkan berdasarkan tabel di atas jumlah anak rawan di Indonesia tahun 2014 adalah 5.152.606 juta anak, maka anak rawan berkisar 6,67%.

Dari jumlah anak rawan itu, mayoritas kurang atau bahkan tidak mendapat penanganan dan perlindungan dari instansi dan keluarga. Jumlah anak rawan yang tersaji pada tabel 1.1 merupakan hasil dari akumulasi

⁶ Bagong suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hlm. 3.

provinsi di Indonesia, salah satu provinsi yang menjadi penyumbang jumlah anak rawan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. (lihat tabel 1.2)

Table 1.2
Data anak rawan di Provinsi Yogyakarta tahun 2015

Kabupaten/ kota	Anak terlantar	Anak balita terlantar	Anak berhadapan dengan hukum	Anak Jalanan	Anak penyandang disabilitas
Kulon Progo	4.443	534	10	44	394
Bantul	3.341	263	120	52	1.332
Gunung kidul	6.777	816	63	47	482
Sleman	5.197	333	64	34	1.435
Kota jojga	331	32	45	42	653
D I .YOGYAKARTA	20.089	1.978	302	219	4.296

Sumber : BPS DIY, BP2M DIY

Dari data di atas Provinsi DIY menunjukkan tingkat anak rawan dengan jumlah relatif tinggi yakni, Anak terlantar sebanyak 20.089 ribu, anak balita terlantar sebanyak 1.978 ribu, anak berhadapan dengan hukum sebanyak 302, anak jalanan sebanyak 219, dan anak penyandang disabilitas sebanyak 4.296 ribu, total anak rawan di Yogyakarta sebanyak 26.884 ribu anak. Jumlah ini menggambarkan masih banyaknya anak rawan di Yogyakarta dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah sosial anak.

Situasi yang dipaparkan di atas, menunjukan jumlah anak rawan di Indonesia masih tergolong tinggi dan ini merupakan tugas serta fungsi Negara dalam mengambil tanggung jawab untuk memelihara anak terlantar

yang sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit mengatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan⁷

Kemudian diperjelas dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang terdiri dari 91 pasal, mengenai tanggung jawab pemerintah terdapat pada, pasal 21 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak”.

Sedangkan peran masyarakat terdapat pada, pasal 25 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.⁸

⁷ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34, ayat 1

⁸ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peran-peran pemerintah dan masyarakat dalam Pengasuhan anak ini tidak menjamin anak bebas dari masalah penelantaran, kekerasan, kejahatan, dan eksploitasi.⁹

Lebih khusus lagi permasalahan anak telah direspon oleh Kementerian Sosial. Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan dan perlindungan sosial anak. Adapun tugas dari Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesejahteraan sosial anak.¹⁰

“Melalui instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Direktorat Kesejahteraan Anak melakukan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga

⁹ Profil PDAK, <https://www.youtube.com/watch?v=h41Z6opcOnI> , diakses pada 13 Februari 2016 pukul 12.00 wib

¹⁰ Mulia Astuti, dkk., *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus: Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh*, Jakarta 2013, P3KS Press, hlm 1
<http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193.pdf> // diakses pada 25 Januari 2015 pukul 12.00 WIB

kesejahteraan sosial anak”¹¹. Seiring dengan usaha kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah terdapat beberapa kendala berupa :

“Masih lemahnya manajemen SDM, data, dana, pemahaman, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaannya sehingga hasilnya belum maksimal, serta program PKSA ini baru bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, akses pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan”¹².

Alternatif kebijakan yang lain pemerintah juga membuka kesempatan dan kerjasamanya dengan pihak swasta atau non pemerintah (NGO) dan masyarakat luas sebagai mitra kerja pemerintah dalam mengentaskan masalah sosial anak rawan. Beberapa lembaga non pemerintah baik yang berskala nasional maupun internasional yang bekerjasama dalam menangani isu anak adalah Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Yayasan Sayap Ibu, Yayasan Pelayanan Anak Cacat (YPAC), *Save The Children*, *Christian Children Faund*, *Terre des Hommes*.¹³

Melalui lembaga *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* dan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan dari UNICEF adalah dengan melakukan penelitian tentang kualitas pengasuhan anak di Panti Sosial Asuhan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk

¹¹ Keputusan Mentri Sosial Republik Indonesia No 15 A/HUK Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

¹² Mulia Astuti, dkk., *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, hlm. 93.

¹³ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008, hlm.

menyediakan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan di Panti Sosial Asuhan.¹⁴ Panti asuhan harus berfungsi sebagai pusat layanan bagi anak dan keluarga. Karenanya, untuk memposisikan panti secara tepat sebagai institusi yang melaksanakan fungsi tersebut, nama Panti Sosial Asuhan Anak dirubah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).¹⁵

Dengan adanya penelitian "Kualitas Pengasuhan Anak Di Panti Sosial Asuhan Anak", menghasilkan rekomendasi berupa Penyusunan kerangka kerja kebijakan untuk mendukung anak dalam keluarga (*Family Support Services*) melalui dukungan kepada keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan¹⁶. Kemudian *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* bersama Kementrian Sosial membentuk program "Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)", program ini dilakukan secara professional dan efektif serta mendorong terjadinya sistem dan perbaikan dalam perlindungan anak¹⁷.

Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) merupakan program khusus untuk merespon dan mendukung pengasuhan anak dalam keluarga karena anak-anak memiliki hak untuk tinggal bersama keluarga. Program

¹⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, BAB I Pendahuluan.

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, hlm. 6.

¹⁶ Ibid., hlm. 4.

¹⁷ Profil PDAK, <https://www.youtube.com/watch?v=h41Z6opcOnI> , diakses pada 13 Februari 2016 pukul 12.00 wib

ini ada pada wilayah non panti, panti sosial dan panti asuhan.¹⁸ Dalam ruang lingkupnya PDAK memiliki tugas untuk peningkatan penerapan Standard Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk LKSA.

Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) membantu LKSA dalam melakukan pelayanan sosial oleh karena itu PDAK membangun manajemen pelayanan sosialnya untuk mendorong agar panti asuhan sesuai dengan standard yang sudah ditentukan. Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan manajemen, dan pada akhirnya, tak dapat dipungkiri bahwa manajemen memang diperlukan bagi semua orang, baik dalam kelembagaan formal maupun kelembagaan informal.¹⁹

Kegiatan PDAK tersebut, berlandaskan dari realita yang ada mengenai pelayanan panti kesejahteraan sosial di Indonesia cenderung masih konvensional, artinya pelayanan yang diberikan LKSA masih hanya pemenuhan kebutuhan dasar (pakaian, tempat tinggal, dan makanan), seharusnya pelayanan LKSA sudah mengarah pada kegiatan yang komprehensif atau pemberian pelayanan dasar dan pemberdayaan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena masih rendahnya sumber daya (6M)²⁰ yang dimiliki lembaga. Secara lebih operasional, mengkaji kualitas pelayanan sebuah lembaga pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dari

¹⁸ Wawancara dengan Project Coordinator Families Firsts DIY, 3 februari 2016

¹⁹ Ranupandojo hejirachman, *Teori dan Konsep Manajemen* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2014), hlm. 15.

²⁰ 6 M : *Man, Money, Methods, Materials, Machines, Market*

penilaian terhadap sistem kelembagaan secara keseluruhan.²¹ Adapaun faktor keterbatasan sumber daya itu mendorong terbentuknya kondisi yang mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan sosial kepada anak yaitu:

- (1) Pelayanan sosial kepada anak cenderung sektoral dan fragmatis,
- (2) Pengembangan program cenderung berdasarkan tren isu aktual,
- (3) sumber daya pelayanan terbatas,
- (4) Program dibuat cenderung reaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah kritis,
- (5) Fokus pelayanan bertumpu pada pendekatan institusi / panti sosial dan cenderung mengabaikan pendekatan keluarga dan masyarakat.²²

Gambaran permasalahan-permasalahan di atas itulah yang harus dikaji secara mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bisa merumuskan beberapa hal penting yang merupakan kegelisahan peneliti yaitu jumlah anak rawan yang semakin meningkat dan penanganannya permasalahan anak yang terus mengalami dinamika, baik secara kelembagaan maupun kegiatan. Seperti yang dilakukan oleh *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* dengan program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga. Dari kegelisahan yang tertuang dalam latar belakang penelitian skripsi ini, maka berdasarkan kegelisahan itu bisa dirumuskan yang menjadi rumusan masalah penelitian yaitu :

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm. 185.

²² Kementerian Sosial RI, Rencana Strategis 2015 – 2019 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Anak Indonesia Melalui Peran dan Tanggung Jawab Keluarga Serta Masyarakat

Bagaimanakah peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam membangun manajemen pelayanan sosial di Panti Asuhan Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam membangun manajemen pelayanan sosial di Panti Asuhan Yogyakarta, adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui, menggambarkan dan mendiskripsikan peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam ikut membangun model manajemen pelayanan sosial di Panti Asuhan Yogyakarta yang lebih mengutamakan aspek pemberdayaan anak dalam keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran teoritis yang berguna bagi mahasiswa/i dalam bidang ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam manajemen pelayanan social.
 - b. Hasil data dari penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dan mempermudah pengembangan lebih lanjut baik jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

2. Secara praktis

- a. Hasil kesimpulan penelitian ini, dapat menjadi bahan referensi serta menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan kembali organisasi *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* dalam program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK).
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan atau bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga sosial anak khususnya yang ada di Yogyakarta betapa pentingnya membangun manajemen pelayanan sosial.
- c. Hasil penelitian ini bagi akademisi Ilmu Kesejahteraan Sosial dapat menjadi gambaran dan model manajemen pelayanan sosial yang terdapat dipanti, kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut dalam praktek dilapangan.

E. Kajian Pustaka

Setelah meneliti dan mengkaji terhadap skripsi, tesis, jurnal dan pustaka, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang “Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam Membangun Manajemen Pelayanan Sosial di Panti Asuhan Yogyakarta. Hanya saja peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, baik itu berupa penelitian atau yang lainnya, diantaranya adalah :

Penelitian *pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Andi Amalia Pallawasukka (2014) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin Makasar dengan judul “ Peran

Organisasi *Save The Children* dalam Penanganan Kasus Pekerja Anak di Indonesia”, dalam hasil penelitian yang disampaikan di skripsi ini yakni, yaitu memberikan sosialisasi kepada anak-anak yang terjerumus kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA), serta masyarakat setempat mengenai bahaya dan dampak dari kasus ESKA. Anak-anak tersebut juga diberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan diberikan keterampilan khusus bagi anak-anak, serta diberikan pelayanan konseling.²³

Penelitian yang *kedua*, Tesis yang ditulis oleh Evi Mulyati, S.Si, (2015), jurusan *Interdisciplinary Islamic Studies*, konsentrasi Pekerjaan Sosial, Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Penanganan Kasus Anak Terlantar Melalui Manajemen Kasus di Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) di Yogyakarta”, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penanganan kasus anak terlantar melalui manajemen kasus di PDAK Yogyakarta dilakukan secara rutin satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan pekerja sosial dalam menangani kasus anak terlantar. Manajemen kasus di PDAK ini memiliki tahapan yang dimulai dari *intake* dan *engagement*, asesmen, rencana intervensi, intervensi, monitoring, evaluasi, terminasi dan *case close*. Kemudian dalam implementasinya secara keseluruhan pelayanan

²³ Andi Amalia Pallawasukka, *Peran Organisasi Save The Children dalam Penanganan Kasus Pekerja Anak DI Indonesai*, Skripsi, (Makasar : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Hasanudin Makasar, 2014)

manajemen kasus yang dilakukan pekerja sosial sudah sesuai dengan panduan pelaksanaan dari teori tentang manajemen kasus.²⁴

Penelitian *ketiga* yakni jurnal penelitian yang ditulis oleh Mohammad Teja (2014) peneliti muda sosiologi pada tim kesejahteraan sosial Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) dengan judul “Perlindungan Anak Terlantar di Panti Asuhan” dalam jurnal penelitian terdapat hasil penelitian yakni, pola atau model pengasuhan yang berbasis keluarga diharapkan menjadi fokus utama dalam pemenuhan hak anak untuk berada dan tumbuh di lingkungan asli mereka. Pada kenyataannya, beberapa kasus anak dalam panti asuhan disebabkan persoalan perekonomian keluarga yang mendorong orang tua memasukkan anak mereka ke panti asuhan. Dengan demikian pemerintah atau pihak pengelola panti asuhan anak kiranya dapat mengembangkan pendekatan berbasis penguatan keluarga dalam mengatasi permasalahan anak terlantar selain cara konvensional dengan mendirikan panti asuhan anak.²⁵

Penelitian *Keempat* skripsi yang relevan dengan pembahasan Manajemen Pelayanan sosial yang ditulis oleh Irma Mar Atun Hasanah (2015) Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan

²⁴ Evi Mulyati, S. ST , *Penanganan Kasus Anak Terlantar Melalui Manajemen Kasus di Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)*, Tesis, (Yogyakarta: jurusan Interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasi Pekerjaan Sosial, Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

²⁵ Mohammad Teja, “Perlindungan Terhadap Anak Terlantar di Panti Asuhan”, dalam jurnal Info Singkat Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Vol VI, No 05/I/P3DI , (Maret 2014)

udul “ Manajemen Pelayanan Sosial Lanjut Usia di UPT Werdha Budhi Darma Kota Yogyakarta, dalam hasil penelitian yang disampaikan di skripsi ini yakni, manajemen pelayanan di UPT Werda Budhi Darma terdiri dari beberapa rangkaian yaitu Rancangan Kerja Anggaran (RKA) atau dalam teori disebut perencanaan, Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau disebut perencanaan, pengembangan SDM, Supervisi atau pemeriksaan, penyelenggaraan keuangan, monitoring, dan rapat koordiansi atau evaluasi. Manajemen pelayanan sosial di UPT Werdha Budhi Darma Kota Yogyakarta sebetulnya merupakan sebuah siklus proses fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian perencanaan RKA, pengorganisasian seperti yang ada di DPA dan penyelenggaraan keuangan, pengarahan seperti pada pengembangan SDM dan supervisi, lalu pengendalian monitoring dan evaluasi. Proses ini akan terus dan saling mempengaruhi.²⁶

Dari beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dalam obyek formal dan materiil dengan penelitian yg akan dilakukan, diantaranya, kesamaan pada obyek formal yang sama-sama dalam membahas tentang permasalahan anak dan cara penanganannya didalam panti, namun penelitian skripsi ini lebih fokus tentang manajemen pelayanan sosial yang dilakukan. Sedangkan obyek materiil sama-sama mengkaji tentang peran organisasi non pemerintah dalam pemberdayaan

²⁶ Irma Mar Atun Hasanah, *Manajemen Pelayanan Sosial Lanjut Usia di UPT Werdha Budhi Darma Kota Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

dipanti, namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada salah satu program organisasi non pemerintah.

Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan di atas belum ada penelitian tentang peran program organisasi non pemerintah Khususnya *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* Yogyakarta dalam membangun manajemen pelayanan sosial dipanti asuhan baik panti asuhan pemerintah ataupun non pemerintah. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah *Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga dalam Membangun Manajemen Pelayanan Sosial di Panti Asuhan Yogyakarta*.

F. Kerangka Teori

F.1. Tinjauan tentang Kesejahteraan Anak

“Anak adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”²⁷, pengertian yang lain “anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.”²⁸

Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan dan mendukung perlu dilaksanakan pemeliharaan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah

²⁷ Undang – Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁸ Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan* hlm. 16.

suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.²⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam undang-undang ini diuraikan tentang usaha kesejahteraan anak, yakni:

usaha kesejahteraan anak terdiri dari (1) Usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi, (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dilaksanakan baik dalam maupun diluar panti, (4) pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat, dan yang terakhir pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai yang tertulis sebelumnya (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.³⁰

Kesejahteraan anak sendiri tidak terlepas dari hak dan kewajiban anak. Dalam Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989 mendiskripsikan secara detail, menyeluruh, dan maju (progresif) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang materi hukumnya berdasarkan 4 kategori yakni:

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan

²⁹ Ibid., hlm. 14.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, BAB IV pasal 11 ayat 1-4

(formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

- 4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak –hak anak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak³¹.

Bentuk manifestasi dari pemerintah adalah melalui kebijakan primer yang meliputi pendidikan masyarakat, penyebar luasan informasi dan meningkatkan kesadaran pihak-pihak yang terkait tentang kesejahteraan dan perlindungan anak, sedangkan kebijakan sekunder berupa penguatan atau dukungan tanggung jawab keluarga dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak, intervensi dini dalam pencegahan masalah anak, dan yang terakhir kebijakan tersier adalah pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak berupa dukungan intensif terhadap keluarga dan pengasuhan anak diluar keluarganya, dan pelayanan perlindungan sosial langsung terhadap anak rawan.³²

Kebijakan pemerintah telah mefokuskan panti asuhan sebagai alternatif terakhir pengasuhan anak diluar keluarganya, namun dari hasil penelitian tentang kualitas pengasuhan anak di panti asuhan terdapat temuan bahwa panti asuhan hanya berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak.³³ Karena itu panti asuhan mulai

³¹ Zulchaina Z dan Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 35

³² Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan* hlm. 31.

³³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, hlm 4

memerlukan pembinaan tentang sumber daya manusia dan manajemen agar tercapainya pelayanan dan perlindungan anak.

F.2. Tinjauan tentang Manajemen Organisasi Pelayanan Sosial

F.2.a. Pengertian Manajemen

Ilmu manajemen dalam kehidupan individu maupun masyarakat merupakan hal yang penting. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan tujuan itu sendiri merupakan realisasi dari kebutuhan, sehingga secara tak langsung manajemen adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. “Mengenai istilah manajemen sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya lain yang ada dalam organisasi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.³⁴

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi agar tujuan tercapai secara efisien dan efektif. Dua konsep utama untuk mengukur *performance* manajemen adalah efisiensi dan efektifitas, “efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan”³⁵. Efisien dan efektif suatu tujuan manajemen juga didukung dengan adanya fungsi-

³⁴ Ranupandojo heijrachman, *Teori dan Konsep Manajemen*, hlm. 41.

³⁵ Hadi Handoko, *manajemen* (Yogyakarta: BPPE, 2014), hlm. 7

fungsi manajemen. Klasifikasi fungsi-fungsi manajemen terbagi dalam beberapa bagian, yakni:

(a) Perencanaan (*planning*): adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standard yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

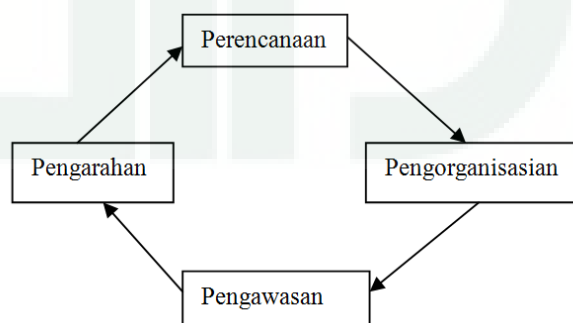
(b) Pengorganisasian (*organizing*): adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai organisasi, perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atas kelompok kerja yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu dan pendelagasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan di koordinasi.

(c) Pengawasan (*Controlling*): adalah penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

(d) Pengarahan (*leading*): adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan, fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin³⁶

Hubungan di antara fungsi-fungsi manajemen dapat dijelaskan dengan gambar berikut (lihat gambar 1.1).

Gambar 1.1
Konsep fungsi Manajemen³⁷



³⁶ Hadi Handoko, *manajemen*, (Yogyakarta: BPPE, 2014), hlm. 24.

³⁷ Ibid., hlm. 26.

Dari gambar di atas terlihat bahwa fungsi satu dengan fungsi yang lain saling berkaitan, setiap fungsi akan menentukan kinerja fungsi lainnya, serta semua fungsi saling bergantung untuk mencapai tujuan. Seperti semua fungsi tidak akan berhasil tanpa perencanaan yang tepat dan cermat, Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain, begitu pula dengan fungsi pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan.

Untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif fungsi manajemen perlu dilaksanakan dengan pendukung yang komperhensif, faktor dalam mencapai tujuan dan menjadi pendukung fungsi-fungsi manajemen yang maksimal ialah memerlukan *tools of management* yang dirumuskan dengan 6 M yakni:

- a) *Men* : tenaga kerja manusia
- b) *Money* : uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan
- c) *Methods* : cara / sistem untuk mencapai tujuan
- d) *Materials* : sumber daya yang dibutuhkan
- e) *Machines* : mesin atau fasilitas yang diperlukan
- f) *Market* : tempat untuk melakukan program, produk.³⁸

Manajemen merupakan alat pencapaian dalam organisasi, baik organisasi profit maupun non profit. Manajemen juga mempengaruhi bagaimana organisasi pada lingkungan eksternal.

F.2.b. Pengertian Organisasi

Organisasi menurut Robbins adalah “kesatuan sosial yang dikoordinir secara sadar dengan batasan yang relative dapat

³⁸ Abdulsyani, *Menejemen Organisasi* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1997), hlm. 28.

diidentifikasi, yang bekerja secara terus menerus untuk mencapai suatu atau sekelompok tujuan yang telah ditetapkan.”³⁹

Terdapat dua bentuk organisasi, yakni *organisasi profit dan non profit*. Organisasi profit adalah organisasi yang tujuannya mencari keuntungan di bidang ekonomi dalam bentuk industri dan berbagai jenis badan usaha (perusahaan), sedangkan organisasi non profit adalah organisasi yang dibentuk untuk menangani isu tertentu yang menarik perhatian publik namun tidak bersifat mencari laba atau komersil. Perbedaan antara organisasi profit dan non profit terdapat pada visi, misi, dan tujuannya. Tujuan utama organisasi non profit ialah memberikan jasa berupa pelayanan, bantuan, dan pendampingan. Pelayanan misalnya: di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, advokasi, gender dan lain sebagainya kepada warga masyarakat yang keberfungsian sosialnya belum terpenuhi dengan baik, pelayanan yang diberikan ini merupakan program pelayanan sosial.⁴⁰

Pelayanan sosial yang menjadi program organisasi sosial dibedakan kembali berdasarkan fungsinya, yakni:

- (a) pelayanan sosial untuk tujuan sosialisasi dan pengembangan, pelayanan ini dilakukan untuk melindungi, mengubah atau menyempurnakan berbagai kegiatan pendidikan, perawatan dan asuhan anak, pengenalan dan penanaman nilai-nilai, pengembangan hubungan sosial, memotivasi, serta meningkatkan kualitas kepribadian. (b) pelayanan sosial untuk tujuan penyembuhan atau kuratif, rehabilitasi dan perlindungan sosial, pelayanan ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu perorangan yang menghadapi

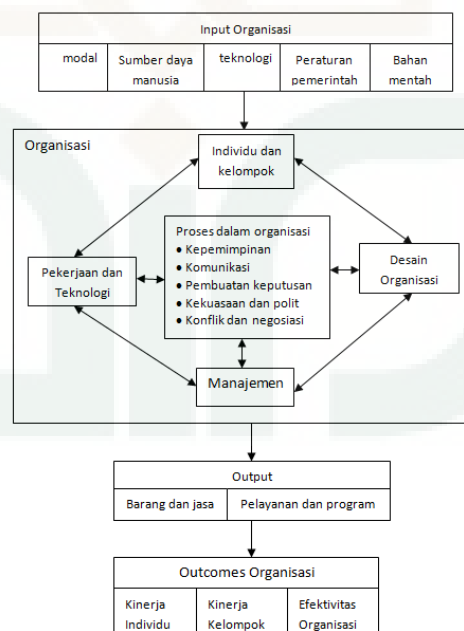
³⁹ Agus Joko P, *Teori Organisasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hlm. 3.

⁴⁰ Bernardien R Wijana, *Mencapai Manajemen Berkualitas*, hlm. 6.

masalah sosial, pelayanan ini tidak selalu berupa bantuan jangka panjang melainkan dapat pula bantuan jangka pendek yang individual, intensif, program perbaikan situasi lingkungan dan relasi sosial, serta membantu pengembangan unsur-unsur kepribadiannya. Kemudian yang terakhir adalah (c) pelayanan sosial untuk membantu masyarakat menjangkau dan menggunakan pelayanan yang sudah ada, pemberian konsultasi dan informasi, pelayanan sosial ini dilakukan karena tidak meratanya informasi tentang tersedianya pelayanan-pelayanan yang ada, pelayanan ini meliputi pemberian informasi, nasehat, rujukan (*raferal*), penanganan keluhan, mewakili penguna jasa baik secara perorangan maupun kelompok, terutama pelayanan yang menyangkut segi-segi hukum.⁴¹

Dari semua yang terdapat dalam organisasi seperti visi, misi, dan tujuan serta program pelayanan sosial yang ada harus melalui tahapan berupa *input*, *proses*, *output* dan *outcomes* seperti yang nampak pada gambar berikut:

Gambar 1.2⁴²
Model tahapan organisasi



⁴¹ Bernardien R Wijana, *Mencapai Manajemen Berkualitas*, hlm. 8

⁴² Agus Joko P, *Teori Organisasi*, hlm.12.

Dari gambar tersebut nampak bahwa organisasi menerima masukan dari lingkungan kemudian diolah menggunakan komponen organisasi, input yang masuk kemudian diproses dengan manajemen menjadi output. Output organisasi dibedakan menjadi output organisasi profit berupa barang dan jasa sedangkan output organisasi non profit berupa pelayanan dan program. Setelah itu akan nampak outcomes yang berupa kinerja individu, kinerja kelompok dan efektifitas organisasi. Pada umumnya, efektifitas organisasi diberikan pengertian sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara efisien dengan sumber daya yang tersedia. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mendesain struktur dan budaya sesuai dengan keinginan *stakeholder*.⁴³

F.2.c. Manajemen organisasi

Organisasi sebagai suatu wadah yang didalamnya terdapat proses manajemen, organisasi dan manajemen memiliki hubungan erat dan saling mempengaruhi. Manajemen sebagai sistem adaptif dalam organisasi sehingga manajemen organisasi yang baik dan benar diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuannya.⁴⁴

Dilingkungan organisasi profit manajemen harus diwujudkan dengan teknik yang dapat menjadikan organisasi unggul dalam lingkungan bisnis yang bersifat kompetitif, sedangkan dilingkungan

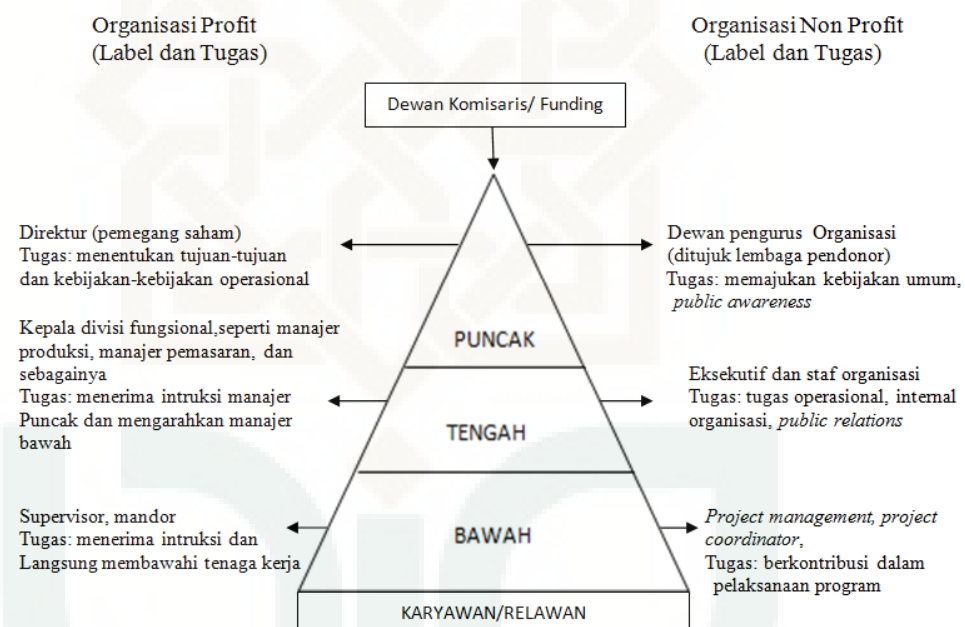
⁴³ Agus Joko P, *Teori Organisasi*, hlm 31.

⁴⁴ Abdulsyani, *Manajemen Organisasi*, hlm. 25.

organisasi non profit teknik pelaksanaannya harus diarahkan pada kegiatan program dan pelayanan yang tepat sasaran.⁴⁵

Kegiatan dalam manajemen organisasi yang efisien dan efektif perlu direncanakan dengan kinerja yang baik, tugas ini biasanya dilakukan oleh manajer-manajer yang diklasifikasikan ke dalam tingkatan manajemen pada organisasi, (lihat gambar 1.3 berikut)

Gambar 1.3
Tingkatan manajemen⁴⁶



Dari gambar di atas menunjukkan dalam tiap organisasi baik organisasi profit dan organisasi non profit terdapat tiga tingkatan yakni manajemen puncak, manajemen tengah dan manajemen bawah dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

⁴⁵ Hadiri nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 2

⁴⁶ Hadi Handoko, *manajemen.*, hlm. 18 (Modifikasi)

Selain tingkatan manajemen, komponen lain yang juga terdapat dalam organisasi serta berhubungan erat dengan tingkatan manajemen yang menjadi pelaku dalam mencapai tujuan, adalah budaya organisasi. Tujuan dari budaya organisasi adalah sebagai landasan terjadinya hubungan antara *stakeholder* internal organisasi dengan eksternal organisasi (konsumen, klien, mitra kerja).

Dalam organisasi “Budaya akan menjadi cara kerja bagaimana manajemen berjalan dalam organisasi. Budaya merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan dan tingkah laku. Budaya organisasi mengacu pada nilai-nilai umum, kepercayaan, norma, dan perilaku. Budaya organisasi juga meliputi symbol, logo, kebiasaan, budaya organisasi penting dalam teori organisasi kerana mempengaruhi semua aspek organisasi seperti bagaimana tujuan dirumuskan, bagaimana hubungan personal, bagaimana pekerjaan dibentuk, dan bagaimana perilaku budaya kerja organisasi.⁴⁷

Secara sederhana budaya organisasi dapat definisikan sebagai kesatuan orang-orang yang memiliki tujuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang sama, berikut beberapa fungsi budaya organisasi, yaitu:

- (a) Budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara organisasi yang satu dengan yang lain.
- (b) Budaya menjadi identitas dari setiap anggota organisasi.
- (c) Budaya mempermudah komitmen dalam setiap kepentingan organisasi.

⁴⁷ Agus Joko P, *Teori Organisasi*, hlm. 9.

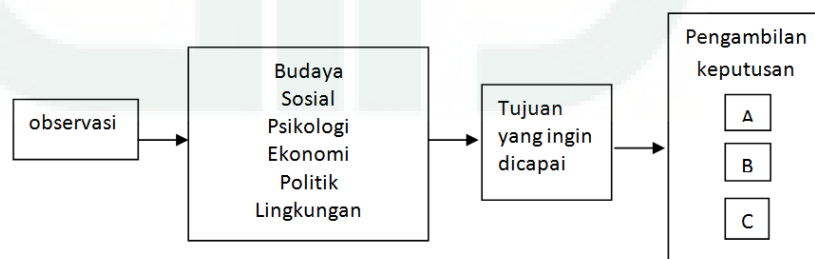
- (d) Budaya meningkatkan sistem sosial dan sistem kerja dengan cara memberikan standar-standar yang tepat mengenai apa yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi.⁴⁸

Dengan mengacu pada definisi tersebut, yang membedakan organisasi satu dengan yang lain adalah sistem bermaknanya (norma, nilai, sikap, dan keyakinan). Budaya organisasi berhubungan dengan persepsi anggota terhadap karakteristik budaya didalam suatu organasasi, baik budaya itu mendukung atau menghambat kinerja, artinya budaya itu merupakan hal penting sebab dapat membedakan konsep organisasi satu dengan yang lain.

F.3. Tinjauan tentang Alur Pendampingan

Kerangka kerja yang dapat diterapkan dalam proses pendampingan sosial adalah teknik kerangka perencanaan, dalam kerangka ini menyarankan urutan keputusan berdasarkan proses dan situasi. Dalam hal perencanaan, pola perubahan antara proses situasi dan nilai akan saling mempengaruhi dan saling menyeimbangkan (lihat Gambar 1.4.)

Gambar 1.4.⁴⁹
Kerangka perencanaan pendampingan



⁴⁸ F.X. Suwanto dkk, Budaya Organisasi, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm, 10

⁴⁹ Patrick G Boyle, Planning Better Program (New York: Mc. Graw Hill Book Company, 1981), hlm 170.

Dari gambar di atas langkah pertama yang dilakukan adalah observasi, pada saat observasi masyarakat sebagai sebuah unit akan berinteraksi pada masalah, kekhawatiran, dan peluang, langkah 2 pada langkah ini hasil observasi akan di analisis berdasarkan segi budaya, sosial, psikologi, ekonomi, politik, dan lingkungan, selanjutnya pada langkah 3 akan dilakukan rekomendasi tindakan yang berdasarkan pada solusi alternatif dan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan.

F.4. Tinjauan Tentang Peran Upaya Pemberdayaan

Menurut Jim Ife dalam bukunya Isbandi Rukminto Adi yang berjudul *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, di sana dijelaskan terdapat empat peran utama yang harus dimiliki *community worker* sebagai pemberdayaan masyarakat yakni berupa:

F.4.a Peran fasilitatif

Peran menciptakan suasana yang menciptakan potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal. Dalam peran fasilitatif ini terdiri dari peran khusus yakni, (1) **animasi sosial** yang bertujuan untuk memberikan kekuatan serta inspirasi motivasi kepada orang untuk melakukan sesuatu, (2) **mediasi dan negosiasi** yang dilakukan saat terjadinya konflik sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah, (3) **pendukung** yang dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap masyarakat agar dapat

mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka, (4) **pembangun consensus** yang ditujukan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dimasyarakat, (5) **pemanfaatan Sumber Daya**, peran ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, serta yang terakhir (6) **mengorganisasi**, peran ini ditujukan untuk berfikir tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan dan hal mana yang harus diprioritaskan.⁵⁰

F.4.b. Peran Edukasional

Peran edukasional dilakukan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah. Dalam peran edukasional ini terdapat peran khusus yakni, (1) **peningkatan kesadaran masyarakat** yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat dapat melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas, (2) **memberikan informasi**, peran ini bertujuan untuk memberikan informasi yang belum diketahui oleh masyarakat dan informasi hendaknya bersifat relevan dan bermanfaat, (3) **mengkonfrontasi**, peran ini dilakukan saat dalam pemecahan masalah tidak ada solusi lain serta mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil agar meminimalisir kerugian atau resiko yang terjadi, (4) **pelatihan**, pelatihan merupakan hal yang paling spesifik dalam edukasional karena secara mendasar memfokuskan pada upaya mengajarkan masyarakat bagaimana

⁵⁰ Isbandi rukminto, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 89

melakukan sesuatu hal baik sebagai sumber atau sebagai penghubung atau penyedia tenaga dalam melakukan pelatihan.⁵¹

F.4.c. Peran Representasional

Peran representasional dilakukan untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat atau individu dapat menjalankan tugas-tugas yang dapat memperbaiki keadaan, peran khusus dalam peran representasional yakni, (1) **mendapatkan sumber**, peran ini bertujuan memberikan arahan untuk mendapatkan sumber seperti sumber pendanaan, tenaga, peluang pekerjaan sehingga dapat menunjang system sumber yang sudah ada, (2) **advokasi**, advokasi dilakukan untuk membela kepentingan-kepentingan masyarakat yang tertindas agar hak-haknya dapat terpenuhi, (3) **memanfaatkan media massa**, pemanfaatan ini bisa menjadi dukungan yang efektif terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai, (4) **hubungan masyarakat**, kegiatan dalam peran ini adalah terlibat aktif dalam pertemuan dengan LSM, pemerintah atau kelompok masyarakat lain guna menjalin hubungan yang baik, (5) jaringan kerja, peran ini berarti mengembangkan relasi dengan berbagai pihak dan berupaya mendorong masyarakat dalam proses pemberdayaan.⁵²

⁵¹ Isbandi Rukminto, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat... hlm .90

⁵² Ibid,...hlm 90

F.4.d Peran Teknis

Peran teknis lebih mengacu kepada penyediaan keadaan yang kondusif dan tepat pada system administrasi dan pengolahan data, peran khusus dalam peran teknis yakni, (1) **pengumpulan dan analisi data**, peran ini lebih pada menggunakan metedologi yang sesuai dan untuk mengetahui permasalahan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan secara tepat, (2) **menggunakan komputer**, kemampuan menggunakan komputer sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan seperti menyimpan data, analisis data, membuat proposal, laporan, dan lain sebagainya, (3) **presentasi verbal dan tertulis** dengan adanya peran ini kemampuan masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan, (4) **mengontrol dan mengelola keuangan**, dalam hal ini pelaku pemberdaya dapat berperan sebagai pengawasan dan audit keuangan.⁵³

F.5. Tinjauan tentang Pendekatan penyembuhan anak rawan

Pendekatan untuk mengatasi masalah anak rawan adalah dengan pengasuhan yang baik. Pengasuhan yang memenuhi kebutuhan anak dapat menggunakan 2 pendekatan pengasuhan Keluarga. Keluarga sendiri adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau pernikahan yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak. keluarga mempunyai penekanan pada

⁵³ Isbandi Rukminto, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pernerdayaan Masyarakat... hlm .90

terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu.⁵⁴ Pendekatan pengasuhan keluarga yang digunakan untuk mengatasi anak rawan adalah sebagai berikut :

a. *Attachment* (kelekatan)

Kelekatan merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya, hubungan ini akan bertahan cukup lama. “Kelekatan merupakan suatu hubungan yang didukung oleh tingkah laku lekat (*attachment behavior*)”. *attachment behavior* Adalah beberapa bentuk perilaku yang dihasilkan dari usaha seseorang untuk mempertahankan kedekatan dengan seseorang yang dianggap mampu memberikan perlindungan dari ancaman lingkungan terutama saat seseorang merasa takut, sakit dan terancam.⁵⁵ Adapun ciri afektif seorang anak dapat dikatakan lekat pada orang lain jika memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Kebutuhan untuk memelihara kedekatan dan kontak.
- b. Kesiapan untuk mengeksplorasi lingkungan.
- c. Mengalami kecemasan atau stress bila mengalami keterpisahan
- d. Merasa bahagia bila berkumpul.

⁵⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm, 3

⁵⁵ Zusy Aryanti, *Kelekatan dalam Perkembangan Anak*, Jurnal Tarbiyah, vol. 12 (Juli-Desember, 2015), hlm 245.

e. Mengalami *griefing* (kesedihan) saat kehilangan.

Kelekatan yang sudah terjalin akan menimbulkan rasa aman, harga diri yang tinggi, kapasitas untuk mempercayai orang lain, dan berkembangnya perilaku positif. Kemudian untuk mencapai kelekatan antara orang tua dan anak harus terbentuknya kondisi yang optimal seperti, kontinuitas yang mencakup interaksi antara orang tua dengan anak yang tetap dan berulang, stabilitas yakni anak membutuhkan lingkungan yang aman dimana orang tua dan anak dapat terlibat dalam proses saling terikat (*bonding*), serta adanya mutualitas yang mengacu pada interaksi antara orang tua dengan anak yang memperkuat pentingnya mereka satu sama lain sehingga proses interaksi yang terjalin menunjukkan bagaimana gaya pengasuhan yang terbaik yang telah dilakukan oleh orang tua pada anak tersebut.⁵⁶

b. Perencanaan Permanensi

Perencanaan permanensi adalah proses sistematis, dalam periode waktu yang singkat, guna melaksanakan satu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu anak-anak hidup dalam keluarga yang menawarkan kesinambungan hubungan dengan orang tua atau pemberi asuhan yang merawat serta kesempatan untuk membangun hubungan seumur hidup⁵⁷

⁵⁶ Bowlby dalam, Zusy Aryanti, *Kelekatan dalam Perkembangan Anak*,... hlm. 249.

⁵⁷ Maluccio dalam, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, hlm 16

Teori ini menjelaskan bahwa pentingnya perencanaan pengasuhan anak secara permanen dari orang tua atau orang yang menjadi pengasuh. Apabila orang tua tidak dapat mengasuh anaknya dikarenakan meninggal dunia atau ketidakmampuan. Maksud dari ketidakmampuan adalah orang tua mengalami penyakit dan secara fisik atau psikis tidak memungkinkan memberikan pengasuhan, kemudian orang tua yang tidak mampu memberikan pengasuhan dikarenakan permasalahan ekonomi, serta terpisahnya orang tua dan anak karena perang atau bencana alam. Anak dapat di asuh oleh saudara biologis bahkan dapat juga oleh orang yang tidak memiliki hubungan sedarah.⁵⁸

Tetapi yang menjadi point utamanya adalah proses pemberian pengasuhan itu sendiri, apakah stabil dan berkelanjutan ataukah sebaliknya, serta kepastian komitmen pengasuhnya dalam memberikan pengasuhan. Konsep ini merupakan konsep pekerja sosial dalam pemberdayaan anak di dalam keluarga agar orang tua atau pengasuhnya dapat merawat, mendidik, dan mengasuh anak secara optimal. Terdapat empat point yang menjadi ukuran kualitas dari *permanency planning* yaitu:

1. *Intent of permanency planning* : Anak mendapatkan rencana arah maksud dan tujuan hidup yang baik, stabil, dan terpenuhinya semua kebutuhannya dari orang tua atau pengasuhnya.

⁵⁸ Maluccio, Module One : Principle Of Permanency Planning and child Protection, 1984, hlm 7

2. *Commitment and continuity of permanency planning* : Anak mendapatkan kepastian pengasuhan yang berkelanjutan dari orang tua atau pengasuhnya.
3. *Legal status of permanency planning* : Anak mempunyai status yang sah dalam pengasuhan di mata hukum dan mendapatkan jaminan legal tentang pengasuhannya.
4. *Social status of permanency planning* : Anak mendapatkan status sosialnya, anak dapat mengeksplorasi keberfungsian sosialnya di lingkungan masyarakat.⁵⁹

Dari 4 point yang menjadi ukuran kualitas rencana permanensi dapat menunjang terjalannya *good parenting* karena pengasuhan yang baik juga dilihat dari proses membesarkan dan mendukung perkembangan fisik dan mental yang juga meliputi emosional, sosial, spiritual dan intelektual anak dari bayi hingga dewasa.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Dengan kata lain metode penelitian berarti cara peneliti mensiasati suatu masalah penelitian, berarti berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masalah tersebut akan diselesaikan atau bagaimana pertanyaan-pertanyaan penelitian akan dijawab. Menurut pengertian ini, metode penelitian bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan.⁶⁰

⁵⁹ Maluccio, Module One : Principle Of Permanency Planning and,,hlm 8

⁶⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu* (Jakarta, Rajawali Pres, 2014), hlm 1.

G.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan peneliti dalam meneliti Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam Membangun Manajemen Pelayanan Sosial di Panti Asuhan Yogyakarta adalah penelitian bersifat diskriptif kualitatif.

“Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan- perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif.”⁶¹

Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif adalah yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. “Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.”⁶²

G.1.a. Subyek dan Obyek Penelitian

(a) Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah “orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat membantu dalam mendapatkan data

⁶¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung...* hlm. 13

⁶² Ghony, M. Junaidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta , Ar Ruzz Media, 2012), hlm 25

sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.”⁶³ Dalam penelitian ini akan diambil dua informan, yang pertama adalah informan formal, dalam menentukan informan formal peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini informan diambil berdasarkan pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶⁴ Adapun yang menjadi informan penting dalam penelitian ini terdiri dari, pertama *Project Coordinator Families first DIY*, kedua *Direct response officer*.

Informan yang kedua adalah informan informal dengan menggunakan teknik *snow ball sampling* teknik yang mula mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Adapun informan informal dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang bekerja di program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga.

(a) Obyek peneltian

Objek dalam penelitian kualitatif adalah realitas sosial yang berarti “sesuatu yang actual” atau “yang berwujud” hal ini juga berarti fakta, yang bisa berbentuk material seperti hal-hal atau benda yang bisa di lihat oleh indrawi dan non-material yaitu fakta yang tidak tampak namun nyata ada di dunia, seperti opini, egoism dan

⁶³ Lexy J.Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 9

⁶⁴ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penlitan* (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 135

altuisme.⁶⁵ Obyek dalam penelitian ini adalah mengenai peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga dalam membangun manajemen pelayanan sosial di Panti asuhan.

G.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ilmiah adalah “penelitian yang dilakukan dengan adanya fakta-fakta yang terjadi”. Salah satunya penelitian yang dilakukan lapangan, oleh karena itu dalam penelitian harus ada data-data valid atau benar yang menjadi fakta suatu penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan berbagai cara :

(a) Observasi

“Observasi adalah metode yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis menggali tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung”.⁶⁶ Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, bersifat *partisipan* artinya bahwa peneliti juga seorang yang ikut serta dalam kelompok yang diteliti.⁶⁷

(b) Wawancara

⁶⁵ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 44.

⁶⁶ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian...*, hlm. 93.

⁶⁷ S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, cet. Ke-8 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 107.

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju pertanyaan atau memberi pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban dari pertanyaan.”⁶⁸ Dalam penelitian ini akan digunakan metode wawancara mendalam. Artinya bahwa jika terdapat jawaban dari pertanyaan yang kurang spesifik atau masih umum maka perlu ditanyakan lebih lanjut, inilah yang disebut dengan teknik menggali informasi lebih dalam, sehingga apabila ada jawaban dari informan yang kurang memuaskan maka perlu ditambah dengan pertanyaan yang sifatnya lebih netral dan mudah dipahami oleh informan.⁶⁹

(c) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini sangatlah penting karena menjadi salah satu pelengkap data dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan tidak hanya sebagai pelengkap data akan tetapi menjadi penjelas terhadap apa yang terjadi dilapangan. Selain itu untuk memperkuat hasil penelitian untuk mencegah kecurangan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 99.

⁶⁹ Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 89.

⁷⁰ Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metedologi Penelitian*,,,,hlm 89

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sebagai alat untuk mendapatkan data dengan melihat semua yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Dalam hal ini dokumentasi dapat berupa gambar atau foto, yang berkaitan dengan proses peran PDAK dalam membangun manajemen pelayanan sosial dipanti asuhan.

G.3. Validasi Data

Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik untuk memperbaiki kemungkinan-kemungkinan temuan dan interpretasi dapat dipercaya. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda atau menggunakan sumber yang berbeda. Teknik ini membantu peneliti *me-recheck* temuan di lapangan dengan cara membandingkan dengan berbagai metode, sumber, atau teori.⁷¹ Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan oleh sumber.

⁷¹ Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Rosdakarya, 2010) hlm, 330.

- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- 5) Memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, foto, gambar, dan beberapa dokumen lembaga.

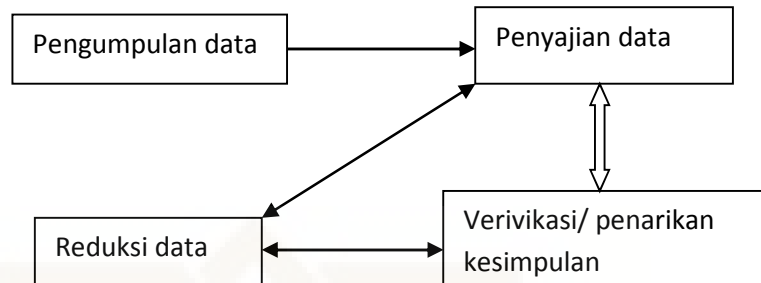
G.4. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi diskriptif kualitatif oleh karena itu untuk menganalisis berbagai data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan untuk menginterpretasikan berbagai data yang telah diperoleh kedalam bentuk kalimat yaitu menggunakan alat analisis berupa reduksi data kemudian penyajian data yang nantinya akan ditarik kesimpulan. Sebagaimana diuraikan oleh Miles Huberman A. Micheal bahwa “data kualitatif menggunakan alat analisis berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (pembuktian kebenaran)”.⁷²

- a. Reduksi data adalah kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta memilih bagian yang penting sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Penyajian data dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyusun informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan yakni langkah menyangkut interpretasi penelitian yang menggambarkan maksud dari data yang disampaikan.

⁷² Miles Hurbeman A. Micheal, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Pes 1992), hlm. 17

Gambar 1.5
Analisis Data Kualitatif Miles Hurbeman⁷³



Dari gambar di atas dijelaskan bahwa pada tahap pertama penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan data seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap kedua hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk kalimat yang disusun sesuai dengan rumusan masalah, penyajian data juga dilakukan dengan mereduksi data atau dengan menajamkan beberapa hasil penelitian dan mengurangi hasil penelitian yang tidak diperlukan, serta pada tahap terakhir setelah hasil penelitian disusun secara sistematis dan sesuai dengan rumusan masalah maka akan ditarik kesimpulan dari seluruh kegiatan dan hasil penelitian tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penelitian ini, peneliti akan membagi dalam empat bab yang berbentuk narasai atau uraian serta tentunya saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lain.

⁷³ Miles Hurbeman A. Micheal, Analisis Data Kualitatif,, hlm 17

BAB 1 yakni, Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II yakni, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian gambaran umum dari sejarah berdiri, kondisi geografis, visi & misi, struktur organisasi, karakteristik komunitas sasaran program, sarana & prasarana dan program kegiatan.

BAB III yakni, membahas tentang isi penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga dalam Membangun Manajemen Pelayanan Sosial di panti asuhan Yogyakarta.

BAB IV yakni, penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan dari uraian yang telah peneliti kemukakan dan analisi hasil penelitian dari bab I sampai bab III, mengenai “*Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam Membangun Manajemen Pelayanan Sosial di Panti Asuhan Yogyakarta*” dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* dalam program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) mendorong terbentuknya *family first, permanency planning, dan good parenting* yang didukung menggunakan pemahaman kelekatan. Kelekatan merupakan ikatan emosial antara anak dengan pengasuh sehingga mendukung kehidupan anak dalam keluarga, dan merupakan manifestasi dari konsep kekeluargaan.
2. Manajemen pelayanan sosial yang dilakukan oleh YSTC terhadap LKSA dampingan itu meliputi strategi pelayanan yang berbasis keluarga (*family first, dan good parenting*), serta melakukan pendampingan dalam akreditasi LKSA. Selain itu penerapan konsep berbasis keluarga dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di LKSA dilakukan dengan cara pengawasan yang dilakukan oleh Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) merupakan penerapan yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan anak. Pengawasan terbagi

3. dalam tiga Indikator-Indikator SNPA yakni standard penentuan respon yang tepat bagi anak, standar pelayanan pengasuhan, dan standar kelembagaan. Sehingga dari penerapan tersebut dapat di rekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang keefetifan dari penerapan SNPA di LKSA.
4. Peran- peran yang dilakukan Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam membangun manajemen pelayanan sosial di Panti Asuhan meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, peran perwalian, dan peran teknis. Dalam peran fasilitatif yang dilakukan PDAK diantaranya sebagai koordinator, pemberi dukungan, dan mefasilitasi kelompok. Peran edukatif meliputi pelatihan dan penyampaian informasi. Peran perwakilan meliputi advokasi berupa usaha pengakuan dan kemandirian LKSA. Peran teknis berupa pengembangan analisi data berupa manajemen kasus. Semua peran pendampingan yang dilakukan PDAK adalah untuk meningkatkan pengasuhan berbasis keluarga dan menanamkan budaya *good parenting*, serta guna mendukung pengakuan sistem pelayanan LKSA melalui akreditasi LKSA.

B. Saran- saran

Dari uraian tentang “Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam Membangun Manajemen Pelayanan Sosial di Panti Asuhan Yogyakarta”, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh pihak terkait:

1. Adanya peningkatan kunjungan, selain dari Tim Monitrong yang melakukan pengawasan satu bulan sekali, Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) seperti *families first manager*, *direct respon officer*, *case worker* dapat secara rutin setiap seminggu sekali secara bergantian melakukan kunjungan untuk meningkatkan pendampingan konsultasi pengasuhan atau penanganan kasus.
2. Penyediaan fasilitas seperti lebih banyak dan detailnya pedoman seperti buku merah atau buku saku Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), pedoman pengetahuan tentang pengasuhan berbasis keluarga sehingga saat staf, pengasuh dan bahkan anak-anak dapat membaca dan mempelajari di waktu senggang.
3. Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) secara intensif melakukan pelatihan kepada pengasuh dan beserta ketua panti melakukan penilaian, sehingga pengasuhan berbasis keluarga dapat dipraktekan dengan efisien dan efektif.

C. Penutup

Alhamdulillah, segal puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentu saja skripsi yang peneliti susun ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan sebagai usaha perbaikan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Semoga skripsi yang peneliti susun ini dapat memberi manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdulsyani, *Menejemen Organisasi*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1997.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penlitian*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Boyle, G. Patrick, *Planning Better Program*, New York: Mc. Graw Hill Book Company, 1981.
- Handoko, Hadi, *manajemen*, Yogyakarta: BPEE, 2014.
- Heijrachman, Ranupandojo, *Teori dan Konsep Manajemen*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2014.
- Junaidi, M. Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Joko, P Agus , *Teori Organisasi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Makaraao, Taufik, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Micheal, A., Hurberman, Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Pes, 1992.
- Moleong, J, Lexy., *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nawawi, Hadiri, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012
- Nasution , S., *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Rukminto, Adi, Isbandi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Suwanto, F.X., dkk, *Budaya Organisasi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013.

Supeno, Hadi, *Mewaspada Eksploitasi Anak*, Jakarta: KPAI CV Graha Putra, 2010.

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008

Wijana, R., Bernardien, *Mencapai Manajemen Berkualitas*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

Z, Zulchaina, dan Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Sumber skripsi, jurnal, dan lain sebagainya

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, *Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekat Multisystem*, Jakarta: Departemen sosial RI, 2004.

Kurnia, Ajat, “*Empowering dan Networking: Alternatif Penanggulangan Anak Jalanan*”, Jurnal Ilmiah Peksos, Vol. 3: 2, Desember: 2004.

Aryanti, Zusy, “*Kelekatan dalam Perkembangan Anak*”, Jurnal Tarbawiyah, vol. 12, Juli-Desember, 2015.

Suharto, Edi, “*presntasi isu-isu strategis 2015: situasi anak Indonesia 2015*”, Jakarta: KEMENSOS RI, 2015.

Perjanjian kerjasama antara Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementrian Sosial RI dan *Save the Chlidren* tentang program perlindungan dan pengasuhan anak berbasis keluarga, No 091/SC-Adm-BP/IV/2014.

Kementrian Sosial RI, Rencana Strategis 2015 – 2019 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Anak Indonesia Melalui Peran dan Tanggung Jawab Keluarga Serta Masyarakat.

Pallawasukka, Amalia, Andi, *Peran Organisasi Save The Children dalam Penanganan Kasus Pekerja Anak DI Indonesai*, Skripsi, Makasar : Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar, 2014.

Mulyati, S. ST, Evi, *Penanganan Kasus Anak Terlantar Melalui Manajemen Kasus di Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)*, Tesis, Yogyakarta: jurusan Interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasi Pekerjaan Sosial, Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Teja, Mohammad, “*Perlindungan Terhadap Anak Terlantar di Panti Asuhan*”, jurnal Info Singkat Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Vol VI, No 05/I/P3DI, Maret 2014

Hasanah, Mar Atun, Irma, *Manajemen Pelayanan Sosial Lanjut Usia di UPT Werdha Budhi Darma Kota Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Maluccio, “*Principle Of Permanency Planning and child Protection*”, Module One, 1984.

Badan Pusat Statistik, *Indonesia Dalam Angka* 2015

Suber Wibase

Profil Pusat Dukungan Anak dan Keluarga,

<https://www.youtube.com/watch?v=h41Z6opcOnI> , diakses pada 13 Februari 2016 pukul 12.00 wib

Mulia Astuti, dkk., *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus: Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh*, Jakarta 2013, P3KS Press, hlm 1

, <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193.pdf> // diakses pada 25 Januari 2015 pukul 12.00 WIB

Irwansyah dkk, *Evaluasi Program Pelayanan Sosial Anak di Panti Asuhan Anak Soraja Kabupaten Bone*, Universitas Hasanudin Makasar,

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/7d9431cd081ac94425138badd643dc00.pdf> , diakses pada 13 April 2016 Pukul 20.00 wib

Sumber Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No 15 A/HUK Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, BAB I Pendahuluan.

PEDOMAN WAWANCARA

Tentang *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* Yogyakarta

1. Bagaimana sejarah *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* Yogyakarta?
2. Bagaimana struktur organisasi dan tugas masing masing anggota ?
3. Apa saja program-program *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children*?
4. Siapa saja sumber daya manusia yang ada di *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* Yogyakarta?
5. Bagaimana YSTC menjalin jejaring dengan lembaga lain?

Tentang Program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)?
2. Bagaimana struktur kerjasama dalam Program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)?
3. Berapa jumlah LKSA dampingan PDAK ?
4. Apa saja ruang lingkup dan tujuan Program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)?
5. Bagaimana cara PDAK dalam mengubah paradigma pengasuhan?

Tentang Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)

1. Bagaimana pengasuhan yang diterapkan pada Program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) ?

2. Apa yang dimaksud dengan Standard Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)?
3. Bagaimana pengasuhan yang diterapkan dalam SNPA ?
4. Peran-peran apa saja yang dilakukan oleh Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam membangun manajemen pelayanan sosial di Panti Asuhan Yogyakarta?
5. Kapan peran-peran tersebut dilakukan ?
6. Apa tujuan dari peran-peran yang dilakukan oleh PDAK ?
7. Siapa saja pihak yang terkait dalam membangun manajemen pelayanan sosial di panti asuhan?
8. Bagaimana hasil atau dampak dari peran-peran tersebut?

FOTO-FOTO



Kegiatan wawancara dengan Rose Mery selaku *Project officer gate keeping* YSTC (sebelah kiri), dan Witrijani selaku *families first manager* YSTC (kanan)



Kegiatan *Child Protection and Child Abuse Training* YSTC

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB III STANDAR PENENTUAN RESPON YANG TEPAT BAGI ANAK

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
A. STANDAR TENTANG PERAN LKSA DALAM PELAYANAN BAGI ANAK							
A.1. Peran LKSA							
A.1.a. LKSA berperan dalam mendukung pengasuhan anak oleh keluarga dan memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif	1	Kita menyepakati program tersebut tetapi sistem kebijakan pemerintah belum mendukung	Mereviu Tupoksi, Rapat Koordinasi dengan TAPD dalam rangka Sosialisasi Tupoksi Kegiatan dan dukungan anggaran	Dukungan yang diperlukan misalnya dukungan TAPD , Dukungan dari Swasta, Subsidi Panti	Ada Perubahan Tupoksi bahwa PSAA bisa menangani anak diluar Panti, ada dukungan anggaran dari TAPD	PSAA, Dinas Sosial	Akhir Juni
A.1.b. Penempatan anak di LKSA merupakan pilihan terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti	3	Ada beberapa klien yang belum dapat dilakukan tracing karena belum ada data yang bisa mendukung Tracing	Mempelajari data dokumentasi, penelusuran melalui lembaga perujuk Merujuk Klien untuk ditangani PDAK Yogyakarta	Dukungan SPPD	Bisa dilakukan tracing dan ditemukan keluarga besar	PSAA Save The Children	Desember 2012
A.2. Pencegahan Dari Keterpisahan							
A.2.a. LKSA harus melakukan pencegahan agar anak tidak terpisah dari keluarganya atau dititipkan ke LKSA	2	PSAA melakukan asesmen dan tahu keberadaan keluarga dan kemampuan pengasuhan tetapi belum melakukan reunifikasi	Penguatan Asesmen untuk semua klien, secara bertahap melakukan reunifikasi	Dukungan Perubahan Program dari Perlindungan dan Pengembangan menjadi Pengasuhan Berbasis Keluarga dari Anggaran Daerah	Anak yang hasil asesmennya memungkinkan untuk direunifikasi dilakukan reunifikasi, jenis suport sesuai hasil asesmen, langkah penerimaan calon klien tidak lagi berdasar target	PSAA Dinas Sosial	2 tahun

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB III STANDAR PENENTUAN RESPON YANG TEPAT BAGI ANAK

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
					tetapi yang sesuai dengan ketentuan SNPA		
A.2.b. LKSA perlu memfasilitasi bantuan finansial atau dukungan psikososial pada anak di dalam keluarganya atau membangun akses dan melakukan rujukan kepada lembaga yang memberikan pelayanan kepada keluarga rentan	1	PSAA Hanya melakukan Layanan dalam Panti belum menjangkau anak dalam pengasuhan keluarga, tetapi sedang berupaya dengan beberapa anak dibantu PDAK	Membangun jejaring dengan lembaga swasta, bantuan yang diterima dari masyarakat akan dipergunakan untuk dukungan luar panti, mencoba beberapa anak dalam pengasuhahn keluarga	Dukungan Akses bantuan Masyarakat, Anggaran daerah.	PSAA memberikan layanan Pengasuhan Berbasis Keluarga, PSAA dapat mengakses bantuan lembaga masyarakat lebih banyak lagi untuk mendukung pengasuhan dalam keluarga	PSAA Dinas Sosial	6 bulan
A.3. Peran Untuk Menerima Rujukan							
A.3. LKSA harus bertindak sebagai pihak yang menerima rujukan untuk anak-anak yang membutuhkan asuhan alternatif dan tidak secara proaktif melakukan rekrutmen anak-anak dalam komunitas yang tidak membutuhkan asuhan alternative.	3	PSAA masih melakukan penjangkauan tetapi ada beberapa anak merupakan rujukan dan penerimaan klien yang tahun 2012 (Bln Mei) seleksi dilakukan sudah berdasar rujukan	Tiap penerimaan klien ada surat rujukan, PSAA tidak lagi melakukan penjangkauan, kegiatan sosialisasi ditiadakan,		Tiap calon yang diseleksi merupakan Rujukan, tidak ada lagi penjangkauan	PSAA	2 bulan

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB III STANDAR PENENTUAN RESPON YANG TEPAT BAGI ANAK

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
A.4. Respon Berdasarkan Asesmen yang Akurat							
A.4.a. LKSA perlu melakukan asesmen secara menyeluruh kepada setiap anak yang dirujuk ke LKSA untuk memahami isu-isu yang dihadapi oleh anak dan situasi keluarganya dan kemungkinan solusinya							
A.4.b. Asesmen dilakukan oleh pekerja social yang mendukung pelaksanaan tugas di LKSA bekerja sama dengan Dinsos atau instansi yang menyelenggarakan tugas-tugas di bidang social							
A.5. Respon terhadap Kebutuhan Pengasuhan							
A.5.a. Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah tentang pengasuhan, maka LKSA harus melakukan asesmen untuk mengidentifikasi secara jelas tentang hambatan utama yang dialami keluarga dalam pengasuhan anak							
A.5.b. Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah tidak adanya kemampuan atau keinginan untuk mengasuh maka LKSA perlu memperkuat kemampuan keluarga melalui pelayanan berbasis keluarga atau meningkatkan kapasitas pengasuhan dan keberfungsian keluarga							
A.5.c. Jika pengembalian anak kepada keluarga inti tidak memungkinkan atau bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, maka LKSA harus mengidentifikasi pengasuh dari lingkungan keluarga besar yang mampu memberikan							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB III STANDAR PENENTUAN RESPON YANG TEPAT BAGI ANAK

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
pengasuhan							
A.5.d. Jika pengasuhan dalam keluarga besar tidak memungkinkan, maka LKSA perlu bekerja sama dengan Dinsos/ Instansi Sosial untuk mempertimbangkan dan mengidentifikasi kemungkinan pengasuhan berbasis keluarga pengganti melalui orang tua/ keluarga asuh (fostering), perwalian atau adopsi							
A.5.e. Jika kebutuhan pengasuhan anak tidak dipenuhi oleh keluarga besar dan kerabat, maka LKSA dapat menjadi alternatif terakhir dengan menyediakan pengasuhan darurat, pengasuhan jangka pendek, serta jangka panjang							
A.6. Respon Terhadap Kebutuhan Perlindungan Khusus							
A.6.a. Jika isu utama yang dihadapi anak adalah masalah perlindungan khusus termasuk penelantaran, kekerasan atau eksploitasi, maka LKSA harus segera merujuk kasus tersebut kepada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan (Dinas Sosial/ Instansi Sosial) untuk menentukan intervensi perlindungan yang dibutuhkan.							
A.6.b. Dalam kasus tersebut, penempatan anak dalam LKSA hanya bersifat sementara berdasarkan persetujuan instansi yang berwenang dan bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan diri anak sambil menangani isu perlindungan dan							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB III STANDAR PENENTUAN RESPON YANG TEPAT BAGI ANAK

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
mengidentifikasi solusi jangka panjang							
A.7. Respon Terhadap Kebutuhan Ekonomi							
A.7. Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah ketidakmampuan ekonomi, LKSA perlu memberikan dukungan- tukanak dalam keluarganya melalui bantuan finansial atau pemberdayaan keluarga secara ekonomi, atau mendukung keluarga untuk mengakses program-program bantuan sosial yang tersedia.							
A.8. Respon Terhadap Kebutuhan Pendidikan							
A.8.a. Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah akses terhadap pendidikan, maka LKSA perlu memfasilitasi akses terhadap pendidikan, antara lain biaya sekolah, perlengkapan sekolah, dan transportasi							
A.8.b. LKSA harus menghindari penempatan anak di LKSA untuk tujuan pendidikan							
B. STANDAR RENCANA PENGASUHAN							
B.1. Rencana Pengasuhan							
B.1. LKSA harus menyusun rencana pengasuhan untuk setiap anak, mulai dari pengasuhan di dalam keluarga sampai dengan pengasuhan alternatif baik untuk pengasuhan darurat, jangka pendek, maupun jangka panjang							
B. 2. Pengasuhan Darurat							
B.2. LKSA perlu menyediakan pengasuhan darurat (sampai paling lama 1 bulan) bagi anak-anak yang membutuhkan							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB III STANDAR PENENTUAN RESPON YANG TEPAT BAGI ANAK

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
perlindungan sementara, bekerja sama dengan Dinas Sosial/Instansi Sosial sambil menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga							
B.3. Pengasuhan Jangka Pendek							
B.3. LKSA perlu menyediakan pengasuhan sementara atau jangka pendek (1 sampai dengan 18 bulan) bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif sambil menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga atau keluarga pengganti (orang tua asuh).							
B.4. Pengasuhan Jangka Panjang							
B.4. LKSA perlu menyediakan pengasuhan jangka panjang untuk anak-anak, yang berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial, sama sekali tidak dapat diasuh oleh keluarga atau kerabatnya sambil tetap mengupayakan sesegera mungkin solusi pengasuhan yang permanen di dalam keluarga pengganti melalui orang tua asuh (<i>fostering</i>), perwalian atau pengangkatan anak							
B.5. Transmisi Menuju Pengasuhan Yang Lebih Permanen							
B.5. Pengasuhan dalam LKSA hanya merupakan transisi dalam perencanaan pengasuhan yang lebih permanen, dimana anak ditempatkan dan mendapat akses terhadap pelayanan sambil menunggu pengasuhan jangka panjang berbasis keluarga.							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB III STANDAR PENENTUAN RESPON YANG TEPAT BAGI ANAK

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
--	------	---------	------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------



LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
A. Standar Pendekatan Awal dan Penerimaan Rujukan							
IV.A.1. Pendekatan awal merupakan tahapan pertama untuk menemukan kesesuaian antara kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pengasuhan, dengan pelayanan yang tersedia di komunitas ataupun di LKSA.							
IV.A.2. Kontak awal anak dan atau keluarga dengan LKSA dapat dilakukan melalui: a. Rujukan dari keluarga dan kerabat; b. Rujukan dari anggota komunitas; c. Rujukan dari pihak yang memiliki kewenangan seperti kepolisian, (RPSA dan Dinsos/Instansi Sosial; d. Rujukan dari lembaga yang memberi pelayanan pada anak, seperti LPA, LSM, sekolah, Posyandu; e. Anak dan keluarga datang sendiri.							
IV.A.3. Asesmen awal adalah proses yang harus dilakukan oleh LKSA untuk: 1) Mengidentifikasi kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pelayanan, termasuk apakah anak bisa tetap diasuh keluarganya atau membutuhkan pengasuhan alternatif. 2) Mengumpulkan data dasar tentang anak dan keluarganya sebagai dasar bagi pengambilan keputusan pelayanan yang sesuai untuk anak dan keluarganya.							
IV.A.4.a. LKSA bersama anak dan keluarga mengambil keputusan berdasarkan asesmen awal tentang pelayanan yang dibutuhkan anak & keluarganya.							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
IV.A.4.b. Berdasarkan hasil asesmen, anak dapat menjadi klien LKSA dengan tetap tinggal di keluarganya atau keluarga pengganti atau tinggal di LKSA							
IV.A.5.a. Untuk semua pelayanan yang akan diterima anak dan keluarganya perlu ada kesepakatan yang melibatkan anak, orang tua/wali, pihak LKSA.							
IV.A.5.b. Untuk kasus anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya, kesepakatan harus melibatkan Dinsos/ Instansi Sosial.							
IV.A.5.c. Jika hasil asesmen menyatakan bahwa anak perlu tinggal di LKSA, maka penempatan anak di LKSA perlu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang melibatkan anak, orang tua atau wali dan pengurus LKSA atau pihak Dinas Sosial/Instansi Sosial jika anak tidak diketahui keberadaan keluarganya.							
IV.A.5.d. Kesepakatan penempatan anak di LKSA anak harus mencantumkan pernyataan persetujuan yang memuat jangka waktu penempatan, hak-hak anak, dan tanggung jawab serta peran LKSA dan keluarga.							
IV.A.6.a. Jika pelayanan yang tersedia di LKSA tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, maka LKSA harus merujuk anak tersebut kepada LKSA atau lembaga pelayanan lainnya yang sesuai.							
IV.A.6.b. Jika anak diidentifikasi mengalami							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
kasus erlindungan khusus, maka Dinsos/Instansi Sosial harus menunjuk seorang pekerja sosial profesional untuk menentukan dukungan khusus yang dibutuhkan anak							
IV.A.7. LKSA harus memutuskan agar anak yang memiliki hubungan saudara tidak dipisahkan, selama tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak (Hanya untuk LKSA yang memiliki anak bersaudara)							
B. Standar Pelayanan Pengasuhan oleh LKSA							
IV. B. I.a. LKSA harus melakukan asesmen lanjutan kepada setiap anak dan keluarganya setelah dicapai kesepakatan tentang pelayanan yang akan diterima anak dan keluarganya							
IV.B.1.b.1. Perencanaan pengasuhan harus didasarkan pada hasil asesmen lanjutan dan akan menjadi dasar untuk menentukan solusi pengasuhan tetap yang terbaik untuk anak dalam kasus masing masing							
IV. B.1.b.2. Perencanaan untuk setiap anak harus dirumuskan dengan tujuan: a. Mengatasi masalah-masalah utama yang secara langsung menghambat dalam pengasuhan dari orang tua/keluarga atau kerabat. b. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan pengasuhan akibat ketidakmampuan orang tua. c. Mengidentifikasi solusi pengasuhan							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
alternatif untuk anak di luar keluarga jika diperlukan melalui orangtua asuh (<i>fostering</i>), perwalian (<i>guardianship</i>) atau pengangkatan anak (adopsi), apabila pengasuhan dalam keluarga bukan merupakan pilihan atau bukan dalam kepentingan terbaik untuk anak.							
IV.B.1.b.3. Perencanaan harus bersifat dinamis dan bertahap sesuai dengan perkembangan yang dicapai oleh anak dan orang tua dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak yang bersifat darurat, jangka menengah, dan jangka panjang							
IV.B.2.a Kegiatan-kegiatan pelayanan untuk anak dan keluarganya dapat diberikan melalui dukungan pengasuhan dalam keluarga; dukungan pengasuhan dalam keluarga pengganti, dan pelayanan pengasuhan dalam LKSA apabila anak terpaksa ditempatkan di LKSA							
IV.B.2.b.1. LKSA harus mencegah keterpisahan anak dari keluarga dan mengupayakan penyatuan kembali anak dengan keluarga sesegera mungkin untuk anak-anak yang sudah ditempatkan di LKSA							
IV.B.2.b.2. LKSA perlu melakukan penguatan kepada keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak untuk mempersiapkan kembalinya anak dan tetap memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas keluarga dalam							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
pengasuhan.							
IV.B.2.b.3. Dukungan kepada keluarga dapat dilakukan melalui dukungan psikososial, ekonomi, serta menciptakan akses dan rujukan terhadap berbagai sumber dukungan yang tersedia untuk keluarga rentan.							
IV.B.2.c.1. LKSA harus bekerjasama dengan Instansi/Dinas Sosial untuk mencari keluarga pengganti yang bisa memberikan pengasuhan melalui sistem orang tua asuh (<i>fostering</i>), perwalian (<i>guardianship</i>) atau pengangkatan anak (adopsi)							
IV.B.2.c.2. Dinsos/Instansi Sosial harus melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, membuat laporan sosial, dan melakukan pemantauan sesudah anak ditempatkan di keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat							
IV.B.2.c.3. LKSA perlu mendukung Dinas Sosial/Instansi Sosial dalam proses identifikasi calon keluarga asuh dan calon keluarga angkat serta menghubungkan calon keluarga pengganti tersebut dengan anak dan atau keluarganya untuk memastikan bahwa anak ditempatkan sesuai dengan kepentingan terbaiknya dan kesepakatan anak							
IV.B.2.c.4. Penentuan dan pengalihan pengasuhan anak pada keluarga							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
asuh, wali, atau keluarga angkat harus dilakukan oleh Dinsos/Instansi Sosial yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.							
IV.B.2.d. Pengasuhan melalui orang tua asuh bersifat sementara, dimana anak harus segera kembali dalam pengasuhan orang tua, keluarga besar, atau kerabat anak apabila berdasarkan hasil asesmen mereka dianggap sudah dapat melakukan pengasuhan kembali atau anak telah memperoleh solusi pengasuhan yang lebih permanen.							
IV.B.2.e. Pengasuhan melalui perwalian anak bersifat sementara, dimana kuasa asuh terhadap anak dialihkan secara legal kepada seseorang yang ditunjuk Pengadilan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak.							
IV.B.2.f. Pengasuhan melalui pengangkatan anak bersifat permanen, dimana kuasa asuh terhadap anak dialihkan secara tetap dan legal kepada keluarga angkat dan pelaksanaannya diatur melalui PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak							
C. Standar Pelayanan Berbasis LKSA							
IV.C.1. Dalam hal anak tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat, atau keluarga pengganti, maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis LKSA.							
IV.C.2.a. LKSA harus berperan sebagai							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di LKSA, dan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak mereka.							
IV.C.2.b. LKSA harus memahami bahwa setiap aspek hak anak tidak dapat dipisahkan dan pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara menyeluruh.							
IV.C.3.a. Setiap anak harus diakui, diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang utuh, memiliki karakter yang unik, memiliki pendapat, pilihan, dan kapasitas serta kemampuan masing-masing.							
IV.C.3.b. Setiap anak harus dihargai martabatnya sebagai manusia							
IV.C.3.c. LKSA harus menjamin bahwa anak terhindar dan terlindungi dari semua bentuk perlakuan, termasuk perkataan dan hukuman yang dapat mempermalukan atau merendahkan martabat mereka.							
IV.C.3.d. LKSA harus menjamin setiap anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi, antara lain berdasarkan jenis kelamin, status sosial, etnisitas, budaya, agama, atau kecacatan, baik dari orang dewasa maupun antar anak.							
IV.C.4.a.1. LKSA melarang digunakannya segala bentuk kekerasan dan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin.							
IV.C.4.a.2. LKSA memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mencegah, me-							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
laporkan, dan merespon segala tindakan kekerasan pada anak yang didiseminasikan kepada setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja atau memiliki kontak dengan anak, dan kepada anak.							
IV.C.4.a.3. Dalam mencegah dan merespon kekerasan dan hukuman fisik, LKSA harus memperhatikan isu spesifik yang terkait dengan usia, gender, dan kecacatan							
IV. C.4.b.1. LKSA harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia yang memungkinkan anak melaporkan kekerasan atau tindakan yang tidak senonoh pada pihak yang berwenang							
IV.C.4.b.2. Anak harus memperoleh informasi dan penjelasan tentang bagaimana mereka dapat menggunakan mekanisme tersebut untuk melaporkan kecurigaan atau kasus yang mereka alami, lihat, atau dengar pada instansi yang berwenang							
IV.C.4.c.1. LKSA harus memastikan bahwa setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja tidak memiliki catatan kriminal, sejarah kekerasan atau perilaku tidak pantas terhadap anak							
IV.C.4.c.2. LKSA harus memastikan bahwa semua pengurus, petugas, dan relawan menerima pelatihan, dan kegiatan komunikasi, informasi, dan pendidikan							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
lainnya untuk mencegah dan memberi respon yang efektif dan tepat terhadap kekerasan							
IV.C.4.c.3. Review terhadap kinerja pengurus, petugas, dan relawan harus dilakukan dengan melihat kapasitas mereka untuk bekerja secara pantas dan memadai bersama anak, termasuk mempertimbangkan umpan balik dari anak dalam proses review.							
IV.C.4.d.1. Prosedur pemberian hukuman disiplin harus dijalankan untuk pengurus, petugas, dan relawan LKSA yang telah dilaporkan melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk berhenti sementara selama investigasi jika dibutuhkan untuk memastikan perlindungan bagi anak							
IV.C.4.d.2. Setiap kecurigaan atau kasus harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi/Dinas Sosial dan ketika kasus tersebut digolongkan sebagai tindak kriminal, harus dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan Kemensos RI.							
IV.C.4.d.3. Jika pengurus, petugas, dan relawan terbukti melakukan tindakan kekerasan, maka prosedur penegakan disiplin harus berjalan sesuai tingkat keseriusan dari kasus tersebut, mulai dari peringatan tertulis, larangan melaksanakan tugas sampai ada keputusan lebih lanjut, dan pemecatan							
IV.C.4.e.1. LKSA harus menjamin lingkungan							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
yang kondusif dan aman bagi keselamatan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan dan hukuman fisik melalui peraturan, prosedur dan mekanisme yang berlaku di LKSA, kegiatan pelayanan, dan sarana prasarana							
IV.C.4.e.2. LKSA harus memfasilitasi keterlibatan masyarakat untuk secara aktif mencegah, merespon, dan melaporkan kekerasan dan hukuman fisik.							
IV.C.4.e.3. LKSA harus memiliki mekanisme untuk mendiskusikan kasus kekerasan dan hukuman fisik pada anak di lingkungan sekolah dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan.							
IV.C.4.f.1. LKSA harus memberlakukan kebijakan untuk mencegah dan merespon segala bentuk tindakan kekerasan dan hukuman fisik antar anak, termasuk pemerasan, ancaman, dan <i>bullying</i> .							
IV.C.4.f.2. LKSA harus melakukan berbagai upaya pencegahan melalui membangkitkan kesadaran akan dampak dari kekerasan dan hukuman fisik, membangun kapasitas untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan, dan berbagi pengetahuan tentang HAM dan perlindungan anak.							
IV.C.4.g. LKSA harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia untuk anak melaporkan kekerasan pada pihak yang berwenang.							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
IV.C.4.h. Pengasuh harus memahami tahapan perkembangan anak sehingga dapat memberikan respon yang tepat terhadap kebutuhan anak sebagai individu, termasuk kebutuhan untuk berpartisipasi sesuai kematangan anak							
IV.C.5.1. Anak perlu didukung keterlibatannya dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan percaya diri dan membangun konsep diri yang baik.							
IV.C.5.2. Anak perlu memperoleh tanggung jawab sesuai kematangan usia mereka, sehingga diakui kapasitasnya untuk membuat pilihan dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.							
IV.C.5.3. Kegiatan dan pendekatan LKSA harus dilakukan dengan pemahaman bahwa masa remaja adalah kunci bagi tahapan sosialisasi sehingga remaja perlu memperoleh ruang dan kesempatan yang fleksibel untuk bersosialisasi secara aman dan bertanggung jawab.							
IV.C.6.a.1. LKSA harus memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas legal yang jelas, termasuk akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)							
IV.C.6.a.2. LKSA perlu mendukung keluarga untuk melengkapi akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP							
IV.C.6.a.3. LKSA dilarang mengganti identitas asal anak, termasuk nama, agama dan etnisitas							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
IV.C.6.b.1. LKSA perlu menjaga keakuratan dan memperbarui data yang terkait dengan keluarga anak setiap saat untuk memastikan anak tidak kehilangan identitas & kontak dengan keluarga.							
IV.C.6.b.2. LKSA perlu mendukung anak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang identitas diri dan latar belakang keluarganya melalui berbagai media untuk mengekspresikan identitas diri mereka seperti lewat penulisan <i>life history</i> juga pengumpulan foto/gambar							
IV.C.6.b.3. LKSA harus melakukan penelusuran dan reunifikasi untuk kasus anak yang mengalami keterpisahan dari keluarganya.							
IV.C.6.b.4. Anak perlu didukung untuk mengekspresikan identitas, budaya, bahasa, etnisitas serta agama mereka dengan mendukung penggunaan simbol-simbol identitas dan praktek berbagai kegiatan untuk memahami dan bersikap toleran terhadap keragaman identitas agama dan budaya tersebut.							
IV.C.7.a.1. LKSA harus memfasilitasi komunikasi sesering mungkin antara anak yang tinggal di dalam dengan orang tua/keluarga/kerabat dan teman-teman dari lingkungan rumah.							
IV.C.7.a.2. Dukungan bagi anak untuk berelasi dengan orang tua/keluarga/kerabat dan teman dari lingkungan rumah							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
perlu diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.							
IV.C.7.b. LKSA perlu memfasilitasi anak untuk mengunjungi orang tua/keluarga/kerabat/teman di rumah sesering mungkin, minimal satu kali per bulan untuk menjaga keeratan relasi anak dengan lingkungan asal dan untuk menyiapkan anak kembali ke rumah.							
IV.C.7.c.1. LKSA harus memfasilitasi keluarga/kerabat/teman untuk berkunjung sesering mungkin untuk menjaga keeratan relasi dengan anak, juga untuk mengetahui perkembangan anak dalam LKSA							
IV.C.7.c.2. LKSA harus mendukung terjalinnya hubungan yang erat antara anak dan calon keluarga pengganti untuk anak yang sama sekali tidak memiliki keluarga, dengan mengunjungi atau dikunjungi oleh calon keluarga pengganti sesering mungkin							
IV.C.7.c.3. LKSA perlu menunjukkan penerimaan yang ramah, menyediakan lingkungan yang nyaman, dan tidak membatasi kunjungan supaya orang tua/keluarga/kerabat dan teman merasa nyaman saat berkunjung.							
IV.C.7.c.4. LKSA perlu memfasilitasi pertemuan bersama antara anak dan keluarga untuk membahas situasi anak dan keluarga supaya anak memahami							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
pentingnya makna keluarga.							
IV.C.7.d. Anak harus ditempatkan dekat dengan tempat tinggal keluarganya/ komunitas dan tidak dipindahkan jauh dari lingkungan tersebut untuk menjaga relasi yang erat antara anak dan lingkungannya.							
IV.C.7.e.1. LKSA harus mendukung relasi persaudaraan diantara anak-anak dengan memperlakukan setiap anak secara adil dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab, membiasakan untuk saling berbagi dan menghargai, juga untuk saling berdiskusi dan membuat keputusan bersama.							
IV.C.7.e.2. LKSA harus menghindari hubungan kekuasaan yang tidak sehat antara anak, termasuk memberi wewenang pada anak yang lebih tua untuk melaporkan pelanggaran dan mendisiplinkan anak yang lebih muda							
IV.C.7.f. LKSA harus menjadi lingkungan yang positif untuk mendukung anak mendiskusikan aspek positif dan aman dari relasi antara laki-laki dan perempuan serta membangun pemahaman untuk melakukan pilihan yang bertanggung jawab dari relasi tersebut.							
IV.C.7.g. LKSA harus mendukung terbagunnya relasi individual antara anak dengan pengasuh sebagai pengganti orang tua sehingga anak mendapat perhatian secara individual dari pengasuh, dapat menemui pengasuh jika memerlukan							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
dukungan ketika menghadapi masalah atau sekedar ingin berbicara secara pribadi.							
IV.C.7.h.1. Anak harus didukung untuk menjalin relasi yang baik dan positif dengan pihak lain di luar lembaga termasuk guru, teman sekolah, dan lingkungan sekitar dengan mendorong anak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan kegiatan di lingkungan masyarakat							
IV.C.7.h.2. Anak harus didukung untuk menjalin relasi dengan guru/teman sekolah teman dari komunitas, dengan membuka akses untuk berkomunikasi secara pribadi melalui surat, telepon serta untuk mengunjungi dan dikunjungi oleh mereka.							
IV.C.7.h.3. LKSA harus menyediakan lingkungan yang positif agar guru/teman sekolah/teman dari lingkungan sekitar merasa nyaman saat berkunjung ke LKSA							
IV.C.7.h.4. Semua kesempatan anak untuk berelasi dengan pihak luar LKSA diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.							
IV.C.8.a.1. LKSA harus mendorong anak untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam membahas berbagai hal penting yang menyangkut kepentingan mereka, antara lain dalam penyusunan dan pelaksanaan aturan untuk penegakan disiplin, memberikan masukan bagi pelayanan LKSA, serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengasuhan, terma-							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
suk berapa lama anak akan tinggal dalam LKSA dan tujuan dari penempatan anak							
IV.C.8.a.2. LKSA harus menyediakan kesempatan, informasi dan lingkungan yang aman dan kondusif agar anak dapat menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam pembahasan-pembahasan berbagai hal penting tersebut							
IV.C.8.a.3. Keputusan yang diambil dalam LKSA, baik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari anak harus mencerminkan suara, ide & pendapat anak							
IV.C.8.b.1. LKSA harus mendukung kapasitas anak dalam menentukan pilihan untuk berbagai keputusan dalam hidup mereka, sesuai dengan usia perkembangan anak, sebagai bagian dari fungsi pengasuhan dan pelaksanaan peran orang tua yang harus direfleksikan dalam pengasuhan LKSA							
IV.C.8.b.2. LKSA harus mampu mendukung kapasitas anak untuk berpikir dan membuat alasan, memahami pilihan-pilihan yang mereka ambil dan konsekuensi dari pilihan tersebut.							
IV.C.9.a.1.a. Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam LKSA, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai – makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
IV.C.9.a.1.b. Makanan harus disediakan dengan memperhatikan selera anak dan dilakukan secara teratur dengan waktu yang fleksibel sesuai situasi anak terkait waktu kepulangan anak dari sekolah atau kegiatan lainnya.							
IV.C.9.a.1.c. LKSA menjamin anak dengan kebutuhan nutrisi khusus, antara lain karena sakit mendapat makanan khusus sesuai kebutuhan mereka.							
IV.C.9.a.1.d. Anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di malam hari sekalipun							
IV.C.9.a.2.a. LKSA perlu menciptakan situasi makan yang menyenangkan agar anak bisa makan dengan santai, baik didampingi maupun tanpa didampingi oleh pengasuh, sehingga saat makan dapat menjadi sarana bagi anak untuk menjalin komunikasi dan relasi yang erat layaknya dalam keluarga.							
IV.C.9.a.2.b. Untuk mencapai tujuan tersebut, LKSA juga harus menghindari diskriminasi atas dasar apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, usia maupun kecacatan dalam menyediakan pelayanan makan bagi anak, misalnya dengan membuat aturan untuk anak laki-laki atau anak yang lebih tua untuk makan lebih dahulu							
IV.C.9.a.2.c. Anak tidak boleh terlibat dalam penyiapan makan kecuali dalam bentuk pembekalan keterampilan hidup (<i>life skill</i>) yang bersifat tambahan bagi petugas							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
masak dan dilakukan pada waktu dan cara yang tidak mengganggu waktu belajar & istirahat anak.							
IV.C.9.a.3. Menu dan penyiapan makan harus direview bersama pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan secara reguler minimal 6 bulan sekali, untuk memastikan terpenuhinya standar gizi dan kesehatan bagi anak dengan tetap bersifat fleksibel terhadap ketersediaan produk local.							
IV.C.9.b.1. LKSA harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak							
IV.C.9.b.2. LKSA harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.							
IV.C.10.a.1. Pendidikan formal, non formal/ vokasional dan informal yang diterima anak yang tinggal dalam LKSA adalah bagian dari rencana pengasuhan anak sehingga harus disesuaikan dengan jenis pengasuhan dan jangka waktu anak tinggal di LKSA, baik dalam pengasuhan darurat (maksimal 3 bulan), pengasuhan jangka pendek (3 sampai 18 bulan) dan pengasuhan jangka panjang (lebih dari 18 bulan).							
IV.C.10.a.2.a. LKSA harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di LKSA							
IV.C.10.a.2.b. LKSA harus mendukung tercapainya tujuan akademis pendidikan bagi anak selama mereka tinggal di dalam LKSA, dengan memfasilitasi penyediaan berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti peralatan belajar, sarana transportasi, bimbingan belajar dan fasilitas lainnya.							
IV.C.10.a.2.c. LKSA mendukung anak untuk melakukan pilihan yang terkait dengan pendidikan mereka selama tinggal di dalam LKSA, dengan memberikan informasi memadai dan pertimbangan bagi pilihan anak, memfasilitasi diskusi untuk membahas berbagai alternatif pilihan.							
IV.C.10.a.2.d. LKSA harus mendukung tercapainya fungsi sosial pendidikan bagi anak selama tinggal dalam LKSA, melalui keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan dalam kegiatan sosial lain yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sekurang-kurangnya dengan pemberian ijin, fleksibilitas waktu dan dukungan dana							
C.10.a.3.a. LKSA harus memberi perhatian pada perkembangan pendidikan anak, dengan melakukan <i>review</i> secara berkala bersama dengan penyelenggara pendidikan dimana anak bersekolah minimal 3 bulan sekali							
IV.C.10.a.3.b. Pengurus dan petugas LKSA harus membuka diri untuk dihubungi							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
sewaktu-waktu oleh pihak penyelenggara pendidikan untuk mendiskusikan perkembangan dan hambatan terkait dengan pendidikan anak.							
IV.C.10.a.3.c. LKSA harus melibatkan orang tua/wali dan anak dalam membuat berbagai keputusan tentang pendidikan anak.							
IV.C.10.b.1.a. Kondisi kesehatan atau kecacatan anak tidak boleh menjadi pertimbangan bagi LKSA untuk menolak memberikan pelayanan bagi anak, kecuali ada bukti secara jelas bahwa perawatan anak dalam LKSA akan bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka karena LKSA tidak memiliki fasilitas untuk menyediakan pelayanan kesehatan khusus yg dibutuhkan anak.							
IV.C.10.b.1.b. LKSA harus menjalin kerja sama dengan lembaga atau perorangan yang bisa memberikan dukungan fasilitas kesehatan.							
IV.C.10.b.1.c. LKSA harus melakukan <i>review</i> tentang kebutuhan kesehatan anak dan kesesuaiannya dengan pelayanan kesehatan yang diberikan lembaga oleh tenaga yang berwenang dalam bidang kesehatan dan Kemkes.							
IV.C.10.b.2.a. Anak harus segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan jika terdapat gejala-gejala yang menunjukkan bahwa anak sakit.							
IV.C.10.b.2.b. LKSA memiliki prosedur							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
untuk merespon keluhan kesehatan anak jika sakit termasuk dalam situasi darurat.							
IV.C.10.b.2.c. LKSA harus memiliki prosedur untuk anak yang meninggal di LKSA, yaitu melaporkan kematian anak kepada keluarganya, pemerintah setempat, kepolisian dan lembaga kesehatan jika diperlukan, serta Dinas Sosial/Instansi Sosial							
IV.C.10.b.3.a. Anak harus memperoleh pemeriksaan kesehatan secara reguler dari tenaga profesional di bidang kesehatan untuk merekam catatan perkembangan kesehatannya							
IV.C.10.b.3.b. Lembaga menjadwalkan pelayanan kesehatan reguler minimal sebulan sekali baik yang diselenggarakan oleh LKSA maupun bekerjasama dengan lembaga pelayanan kesehatan setempat.							
IV.C.10.b.3.c. Orang tua/keluarga harus mendapat informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan anak selama tinggal di LKSA, terlibat dalam perawatan anak yang sakit, dan pembuatan keputusan yang terkait dengan tindakan kesehatan pada anak, termasuk ketika anak perlu dioperasi.							
IV.C.10.b.3.d. LKSA memfasilitasi akses anak kepada program perlindungan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat							
IV.C.10.b.3.e. LKSA harus memastikan bahwa setiap anak menerima vaksinasi,							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
imunisasi, vitamin, obat cacing, dan berbagai kebutuhan lain sesuai dengan usia dan kebutuhan tumbuh kembang mereka.							
IV.C.10.b.3.f. LKSA menyediakan peralatan P3K untuk kebutuhan darurat, yang diperiksa secara reguler dan diperbarui isinya jika habis/ kadaluarsa							
IV.C.10.b.4.a. LKSA harus mempromosikan dan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari di LKSA.							
IV.C.10.b.4.b. LKSA harus memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, bahaya merokok dan narkoba sesuai perkembangan usia anak.							
IV.C.10.b.4.c. LKSA melakukan identifikasi dan tindak pencegahan bagi penyakit-penyakit yang potensial menjadi epidemi di daerah sekitar LKSA, seperti malaria, TBC, demam berdarah, kaki gajah, atau chikungunya melalui pemberian informasi pada anak dan berbagai tindakan yg diperlukan.							
IV.C.11.a.1. Pengurus dan staf LKSA harus memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi tersebut.							
IV.C.11.a.2. LKSA harus menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak							
IV.C.11.b. LKSA memiliki peraturan untuk							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
melindungi privasi dan hal-hal yang bersifat pribadi bagi anak, yang diberlakukan bagi anak dan pengasuh.							
IV.C.12.a.1. Anak, dengan didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan bertanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket; namun tetap proporsional dengan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain.							
IV.C.12.a.2. LKSA harus memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi							
IV.C.12.a.3. Jadwal harian anak bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kepentingan individual anak dan direview minimal setiap 6 bulan serta dapat diubah sesuai kepentingan anak berdasarkan hasil evaluasi mereka							
IV.C.12.a.4. LKSA perlu menyediakan waktu dan kesempatan untuk anak berekreasi di luar lembaga minimal sekali dalam 6 bulan supaya mengenal dan memahami lingkungan dan komunitas di sekitarnya							
IV.C.12.b.1. LKSA harus menyediakan berbagai fasilitas istirahat dan bermain bagi anak, tanpa diskriminasi sesuai dengan minat mereka.							
IV.C.12.b.2. LKSA harus menyediakan anggaran untuk memperbaharui atau							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
mengganti berbagai fasilitas bermain anak jika sudah tidak layak digunakan							
IV.C.13.a. Anak dilarang dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau yang termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk praktek sejenis perbudakan, eksploitasi, dan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak							
IV.C.13.b. Anak tidak dilibatkan dalam pekerjaan di LKSA yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak							
IV.C.14.a. Anak-anak bersama-sama pengurus dan staf merumuskan berbagai aturan yang mereka anggap penting untuk kehidupan bersama mereka, untuk kepentingan terbaik anak dan bukan semata-mata untuk menciptakan keteraturan dalam LKSA.							
IV.C.14.b. LKSA harus memahami bahwa penegakkan aturan dan disiplin, termasuk bagaimana cara disiplin tersebut ditegakkan, merupakan upaya untuk mendukung perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain.							
IV.C.14.c. LKSA harus melarang segala bentuk perilaku atau hukuman yang memalukan atau merendahkan anak, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengurus, staf, atau pengasuh yang terbukti melakukan perilaku atau hukuman semacam itu							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
D. Standar Pelaksana Pengasuhan							
IV.D.1.a.1. LKSA harus menentukan bahwa orang tua bisa menjalankan tanggung jawab legalnya terhadap anak karena orang tua merupakan sumber pengasuhan utama bagi anak.							
IV.D.1.a.2. Tanggung jawab tersebut tidak boleh terputus karena penempatan anak di LKS kecuali ada keputusan pengadilan yang mencabut kuasa asuh orang tua terhadap anak tersebut							
IV.D.1.b. Orang tua atau wali yang sah harus bertanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengasuhan anak termasuk untuk <i>review</i> penempatan, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.							
IV.D.2.a.1. LKSA harus menyediakan pengasuh yang bertanggungjawab terhadap setiap anak asuh dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh serta tidak merangkap tugas lainnya untuk mengoptimalkan pengasuhan.							
IV.D.2.a.2. Setiap pengasuh harus memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengasuhan anak serta kemauan untuk mengasuh yang dalam pelaksanaannya mendapatkan supervisi dari pekerja sosial atau Dinsos.							
IV.D.2.a.3. Pengadaan pengasuh harus mempertimbangkan isu gender serta kebutuhan anak berdasarkan usia dan							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
tahap perkembangan mereka.							
IV.D.2.b.1. LKSA harus menciptakan lingkungan tempat tinggal yang menyempurnakan keluarga dan anak asuh untuk memperoleh pengasuhan dari pengasuh tetap/ tidak berubah-ubah seperti halnya dari orangtua.							
IV.D.2.b.2. LKSA harus mempertimbangkan jumlah anak untuk ditempatkan dalam sistem keluarga (<i>cottage</i>) atau wisma sesuai dengan pengasuh untuk setiap keluarga atau wisma.							
IV.D.2.b.3. LKSA harus memfokuskan relasi dan pengambilan keputusan dalam sistem keluarga atau wisma untuk memungkinkan anak mengembangkan kedekatan yang bermakna terhadap orang dewasa dan teman sebaya.							
IV.D.2.c. LKSA harus menyediakan minimal satu orang pengasuh untuk lima anak baik dalam sistem keluarga maupun wisma.							
IV.D.2.d.1. Pengasuh harus melaksanakan pengasuhan dalam rentang waktu 24 jam kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.							
IV.D.2.d.2. LKSA harus menetapkan aturan tertulis tentang pengasuhan yg mencakup kesediaan pengasuh, pergantian tugas pengasuh, dan keberadaan pengasuh yang tinggal di LKSA untuk memastikan pengasuhan kepada anak dilakukan secara tetap dan tidak terputus							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
IV.D.2.d.3. LKSA harus melakukan <i>review</i> pelaksanaan tugas pengasuhan anak secara periodik setiap enam bulan sekali.							
IV.D.2.d.4. LKSA harus segera memutuskan pengasuhan anak oleh pengasuh yang diindikasikan mengancam/ membahayakan keamanan dan keselamatan anak dan mempertimbangkan statusnya sebagai pengasuh.							
IV.D.2.e.1. LKSA tidak mengganti atau memindahkan pengasuh anak tanpa perencanaan agar tidak menghambat kedekatan anak dengan pengasuh.							
IV.D.2.e.2. Penggantian pengasuh harus disertai dengan penyerahan catatan pengasuhan anak dari pengasuh yang akan meninggalkan LKSA kepada pengasuh baru yang diketahui oleh kepala LKSA dan Dinas Sosial.							
IV.D.3.a.1. Pekerja sosial profesional yang bekerja atau ditempatkan di LKSA adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan memiliki kualifikasi untuk bekerja dalam bidang pelayanan anak.							
IV.D.3.a.2. Pekerja sosial profesional harus melaksanakan fungsi dan peran/ tugas secara langsung dengan klien ataupun tidak langsung yaitu mencakup fungsi penanganan masalah anak dan keluarganya, fungsi pengelolaan sumber, dan fungsi edukasi							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
IV.D.3.b.1. Pekerja sosial melakukan penanganan masalah mulai dari asesmen; merumuskan rencana pengasuhan baik darurat, jangka pendek dan jangka panjang; melakukan intervensi untuk mengatasi masalah-masalah khusus yang dialami anak dan keluarganya; serta mendukung pelayanan dan pengasuhan keseharian yang disediakan oleh LKSA.							
IV.D.3.b.2. Pekerja sosial harus mendukung keluarga untuk lebih memahami pentingnya pengasuhan keluarga, memperkuat keluarga dan membangun dukungan masyarakat terhadap pengasuhan keluarga.							
IV.D.3.b.3. Pekerja sosial harus membangun jaringan dengan berbagai sumber untuk mengoptimalkan dukungannya terhadap penguatan keluarga, penanganan masalah anak, pelaksanaan pengasuhan oleh keluarga alternatif, dan pelayanan dalam LKSA							
IV.D.3.c. Jika tidak tersedia pekerja sosial profesional, LKSA harus menyediakan tenaga kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan pelatihan tentang sistem pengasuhan anak dan mendapatkan supervisi yang regular dari peksos professional atau dari lembaga sosial yang ditunjuk atau dari Dinsos.							
IV.D.3.d. Pelaksanaan tugas pekerja sosial harus disupervisi oleh pekerja sosial yang							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN UNTUK LKSA
BAB IV STANDAR PELAYANAN PENGASUHAN

STANDAR	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman bekerja lebih tinggi dalam pelayanan anak							
E. Standar Evaluasi serta Pengakhiran Pelayanan dan Pengasuhan untuk Anak							
IV.E.1. Pemenuhan kebutuhan anak terhadap pengasuhan harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara reguler agar anak tetap mendapatkan pengasuhan yang optimal.							
IV.E.2. LKSA harus melaporkan anak-anak yang melarikan diri atau yang dikeluarkan kepada Dinas Sosial dan bertanggung jawab untuk memastikan keberadaan, keselamatan dan keamanan anak.							
IV.E.3. LKSA harus melakukan pengakhiran pelayanan, setelah anak dipastikan mendapatkan solusi pengasuhan yang permanen.							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB V STANDAR KELEMBAGAAN

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
V. A.1. LKSA harus memiliki visi, misi dan tujuan yang mendasari sistem pengasuhan yang disediakan oleh LKSA, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.							
V.A.2. LKSA harus mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan pelayanan pengasuhan dan pencapaiannya direview secara periodik dengan melibatkan orang tua/wali asuh, anak-anak dan semua pelaksana pelayanan.							
V.B.1.a. Setiap Orsos/LKS yang akan mendirikan LKSA harus secara formal memberitahukan kepada dan meminta kewenangan dari Dinsos untuk memperoleh persetujuan dari komunitas lokal dimana lembaga akan dibangun.							
V.B.1.b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota harus mereview usulan pendirian LKSA berdasarkan asesmen kebutuhan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mencegah pemisahan anak dari keluarganya.(Untuk Dinsos)							
V.B.1.c. Review harus mencakup asesmen apakah Orsos/LKSA yang mengusulkan pendirian LKSA memiliki kapasitas baik kelengkapan teknis, finansial, maupun SDM untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar nasional, sebelum izin pendirian LKSA diberikan. (Untuk Dinsos)							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB V STANDAR KELEMBAGAAN

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
V.B.1.d. Keberlanjutan kebutuhan dan ketepatan pelayanan yang disediakan oleh LKSA harus direview secara reguler oleh Dinas Sosial sebagai bagian dari monitoring dan tanggung jawabnya untuk memberikan dan memperbarui izin pemberian pelayanan (Untuk Dinsos							
V.B.2.a.1) Setiap Orsos/LKS yang akan menyelenggarakan pelayanan sosial untuk anak-anak secara langsung atau melalui LKSA harus: a) Terdaftar di Dinsos sebagai LKS sesuai dengan UU No. 11/2009 ttg Kesos dan Permensos No. 107/ HUK/2009 ttg Akreditasi LKS serta SE Dirjen Rehsos Agustus 2008 terkait sistem penomoran LKSA. b) Mendapat izin operasional berdasarkan hasil asesmen oleh Dinsos yang menunjukkan bahwa lembaga tsb mampu menyelenggarakan pelayanan sosial kepada anak dan memenuhi standar dan Permensos No. 107/ HUK/2009 ttg Akreditasi LKS. c) Menyediakan data ttg pelayanan dan penerima manfaat yang diperbarui setiap tahun untuk diinput ke dalam <i>database</i> nasional ttg situasi anak dalam pengasuhan alternatif. d) Terlibat dalam monitoring secara reguler yang dilakukan oleh Dinsos Kemensos untuk menjamin bahwa							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB V STANDAR KELEMBAGAAN

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
pelayanan yang disediakan benar-benar merespon kebutuhan yang aktual serta sesuai dengan standar nasional, berbagai hukum, dan aturan yang berlaku.							
V.B.2.b. Dinsos/Instansi Sosial Kabupaten/Kota harus memonitor dan mengevaluasi kesesuaian pelayanan yang dilakukan LKSA dengan standar nasional pengasuhan secara regular minimal satu kali per tahun (Utk Dinsos)							
V.B.2.c.1. Asesmen reguler harus dilaksanakan oleh tim khusus dari Dinsos untuk memastikan bahwa LKSA memenuhi standar nasional pengasuhan dan mengidentifikasi tahap yang harus dilakukan oleh institusi pada periode tertentu untuk memperbaiki pelayannya apabila tidak sesuai dengan standar.(Untuk Dinsos) V.B.2.b.2. Dinsos harus melakukan asesmen lanjutan untuk mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai LKSA dan apakah LKSA telah melakukan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan standar nasional pengasuhan.							
V.B.2.c.3. Apabila setelah tiga kali peringatan, Dinsos menemukan bahwa LKSA masih melakukan pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan, maka Dinsos berwenang membatalkan ijin operasional LKSA. LKSA tidak diijinkan							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB V STANDAR KELEMBAGAAN

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
melanjutkan pelayanannya sampai ada kejelasan bahwa LKSA tsb memenuhi standar nasional pengasuhan. (Untuk Dinsos)							
V.B.2.c.4. Dalam kasus dimana pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan mengganggu/ membahayakan keselamatan anak, maka Dinsos dapat segera menarik ijin praktik/operasional dan menunda upaya yang dilakukan LKSA memperbaiki pelayanannya. Ijin tidak akan diperbarui kembali sampai LKSA menunjukkan perbaikan dan sepenuhnya mengimplementasikan standar nasional pengasuhan. (Untuk Dinsos)							
V.B.2.c.5. Dinsos dan Kemensos harus menyediakan dan memberikan penguatan kapasitas kepada pengurus LKSA termasuk pelatihan tentang standar nasional pengasuhan, memberikan dukungan teknis dalam implementasi, dan pelatihan tentang kesejahteraan dan pengasuhan anak. (Untuk Dinsos)							
V.C.I.a. LKSA harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat, dan aman bagi anak untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan (Lakukan observasi dan isi gambaran pada umumnya)							
V.C.I.b. LKSA harus dibangun di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB V STANDAR KELEMBAGAAN

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
ketiga tujuan yang ditetapkan dalam standar. (Lakukan observasi)							
V.C.1.c. LKSA harus aman untuk tempat tinggal dan aktivitas anak sehingga bangunan LKSA harus memperhatikan standar keselamatan dan keamanan. (Lakukan observasi)							
V.C.2.a. LKSA harus menyediakan tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan dan privasi anak (Lakukan observasi)							
V.C.2.b. LKSA harus menyediakan kamar tidur dengan ukuran 9 m2 untuk 2 anak, yang dilengkapi lemari untuk menyimpan barang pribadi anak. (Lakukan observasi)							
V.C.2.c. LKSA harus menyediakan kamar mandi anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak. (Lakukan observasi)							
V.C.2.d. LKSA harus menyediakan toilet yang aman, bersih dan terjaga privasi-nya untuk anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak (Lakukan observasi)							
V.C.3.a. LKSA harus menyediakan ruang makan yang bersih dan perlengkapan makan sesuai jumlah anak. (Lakukan observasi)							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB V STANDAR KELEMBAGAAN

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
V.C.3.b. LKSA harus menyediakan tempat beribadah di lingkungan LKSA untuk semua jenis agama yang dianut anak yang dilengkapi dengan prasarana untuk kegiatan ibadah (Lakukan observasi).							
V.C.3.c. LKSA harus menyediakan ruang kesehatan yang memberikan pelayanan reguler yang dilengkapi petugas medis, perlengkapan medis, & obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan anak (Lakukan observasi)							
V.C.3.d. LKSA harus menyediakan ruang belajar dengan pencahayaan yang cukup baik di siang maupun malam hari (Lakukan observasi).							
V.C.3.e. LKSA perlu menyediakan ruang bermain, olah raga, dan kesenian yang dilengkapi peralatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak							
V.C.3.f. LKSA harus menyediakan ruangan yang dapat digunakan oleh anak maupun keluarganya untuk berkonsultasi secara pribadi dengan pekerja sosial atau pengurus LKSA atau digunakan sebagai ruang pribadi anak ketika anak ingin menyendiri (Lakukan observasi).							
V.C.3.g. LKSA perlu menyediakan ruang tamu yang bersih, rapi, dan nyaman bagi teman atau keluarga anak yang akan berkunjung (Lakukan observasi).							
V.C.4.a. LKSA harus membelajarkan anak, pengurus, dan staf LKSA untuk							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB V STANDAR KELEMBAGAAN

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
mengantisipasi dan menghadapi resiko bencana alam maupun sosial.							
V.C.4.b. LKSA harus memberikan perlindungan kepada anak jika terjadi bencana baik alam maupun sosia							
V.C.5.a. LKSA harus menyediakan staf yang mencukupi dari segi jumlah, kompetensi, dan dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas.							
V.C.5.b. Pimpinan LKSA harus melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja staf.							
V.C.5.c. Pengadaan staf harus mencakup unsur pelaksana utama yaitu pengasuh, pekerja sosial, dan pelaksana pendukung yaitu tenaga kebersihan, petugas keamanan dan juru masak.							
V.C.5.d. LKSA harus menyediakan petugas masak khusus dalam jumlah yang memadai, yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal memasak, juga memahami standar dasar pemenuhan nutrisi dan prinsip higienis dalam menyiapkan makanan							
V.C.5.e. LKSA harus memberikan dukungan kepada staf dalam bentuk fasilitas kerja, dukungan finansial, dan peningkatan kompetensi staf.							
V.C.6.a. LKSA harus memiliki sumber dana tetap, tanpa tergantung dari bantuan pemerintah atau donatur lainnya.							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB V STANDAR KELEMBAGAAN

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
V.C.6.b. LKSA harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.							
V.C.6.c. LKSA harus melibatkan perencanaan keuangan secara akurat tanpa melibatkan anak dalam pengumpulan dana.							
V.C.6.d. LKSA harus memiliki petugas yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan LKSA, sehingga pemanfaatan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara rutin kepada berbagai pihak yang terkait dengan pendanaan LKSA							
V.C.7.a. LKSA harus terlibat dengan dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk koordinasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan LKSA.							
V.C.7.b. LKSA perlu terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi konflik yang terjadi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan pengasuhan melalui LKSA.							
V.C.7.c. LKSA perlu memiliki akses terhadap berbagai sumber di luar LKSA yang mendukung keberlanjutan pelayanan dan pengasuhan serta mendayagunakannya secara efektif.							
V.C.8.a. LKSA harus melaksanakan							

LEMBAR MONITORING DAN RENCANA PENERAPAN STANDARD NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LKSA
BAB V STANDAR KELEMBAGAAN

	Skor	Catatan	Rencana Kegiatan	Sumber Daya yang Diperlukan	Hasil yang Diharapkan	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Tenggat Waktu
kegiatan administrasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara tertib dan menyeluruh.							
V.C.8.b. LKSA harus memiliki <i>database</i> anak, staf dan kegiatan pelayanan yang selalu diperbarui.							
V.C.8.c. LKSA harus menata dokumen data anak, data pelayanan, dan data pengasuh secara tertib yang memungkinkan anak dan petugas mengakses data tersebut saat diperlukan.							
V.C.9. LKSA harus melakukan pencatatan terhadap semua proses dan hasil pelayanan pengasuhan, baik yang dilaksanakan di dalam keluarga maupun di LKSA, serta menjamin kerahasiaan semua dokumen kecuali untuk kepentingan terbaik anak.							
V.C.10.a. LKSA harus melaksanakan monitoring yang dilakukan oleh pengurus dan staf untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.							
V.C.10.b. LKSA harus melakukan evaluasi untuk menilai tercapainya tujuan pengasuhan dan sebagai dasar untuk menyusun rencana berikutnya.							

Sertifikat

PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : DWI PAPSA
 NIM : 12250040
 Fakultas : DAKWAH
 Jurusan/Prodi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Dengan Nilai :

No	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Microsoft Word	85	B
2	Microsoft Excel	25	E
3	Microsoft Power Point	90	A
4	Internet	95	A
Total Nilai		73.75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 31 Desember 2012



Dr. Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom.
 NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



PKSI

Pusat Komputer & Sistem Informasi



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.4.3/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Dwi Papsa**
Date of Birth : **February 19, 1994**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **September 07, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	40
Structure & Written Expression	40
Reading Comprehension	43
Total Score	410

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, September 07, 2016
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.6.12/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Dwi Papsa :

تاريخ الميلاد : ١٩ فبراير ١٩٩٤

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٥ سبتمبر ٢٠١٦, وحصلت
على درجة :

٣٧	فهم المسموع
٢٣	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٦	فهم المقروء
٢٨٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكاكرتا, ١٥ سبتمبر ٢٠١٦
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





41

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.940/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Dwi Papsa
Tempat, dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 19 Februari 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 12250040
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Widodomartani
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Kab. Sleman
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,50 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua

Fatimah, M.A., Ph.D.
NIP. : 19651114 199203 2 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Sertifikat

NO: 119.PAN.OPAK.UNIV.UIN.YK.AA.09.2012

Diberikan kepada

DWI PAPSA

Sebagai

Peserta **OPAK 2012**



Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (**OPAK**) 2012 yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (**OPAK**) 2012 dengan tema:

**MEMUPUK NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM RUANG KAMPUS ;
UPAYA MEMPERKOKOH INTEGRITAS BANGSA**

pada tanggal 5-7 September 2012 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengetahui,

Yogyakarta, 7 September 2012

Pembantu Rektor 3/3

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. H. Ulumad Rijai'ie, M.Pd.

Nomor: 196009051986031006

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abdul Ghafid

Presiden Mahasiswa

Panitia **OPAK 2012**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ronel Muspikuri

Ketua Panitia

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/DD.8/PP.03.1/24/2016

Diberikan Kepada :

DWI PAPSA (12250040)

setelah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam,
dengan kompetensi *engagement*, *assessment*, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo,
intervensi makro, dan evaluasi program.

SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 April 2016

Ketua,




Arif Maftubhin, M.Ag., M.A.I.S

NIP. 19740202 200112 1 002



LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

DWI PAPSA

12250040

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Ketua

Dr. Sriharini, M.Si

NIP. 19710526 199703 2 001



Dekan

Dst. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : DWI PAPSA
NIM : 12250040
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.

NIP. 19600905 198603 1006

CURICULUM VITE

Nama : Dwi Papsa
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta , 19 februari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Alamat : Prawiroderjan GM II / 888 RT 61 RW 18
Telephon : 085743292922 (HP)
Email : dwipapsa@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Formal

2001 – 2006 : SD N Kintelan II Yogyakarta

2006 – 2009 : SMP N 16 Yogyakarta

2009 – 2012 : SMA N 5 Yogyakarta

2012- sekarang : UIN Sunan Kalijaga

Kemampuan

Kemampuan Komputer (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook dan Internet)

Yogyakarta, 5 November 2016

Dwi Papsa
12250040